



WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



**SELAMA 73 TAHUN, BEKERJA
UNTUK PRESTASI BANGSA**

**NILAI STRATEGIS
KAPAL SELAM DALAM
PERTAHANAN NEGARA**

**PANCASILA DAN PERAN
PEMUDA**

**DINAMIKA BELA NEGARA
DALAM MENGISI DAN
MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN**



9 771693 023126



DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Marsdyo TNI Hadiyan Sumintaatmadja

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Redaksi:

M. Adi Wibowo , M.Si.
Lettu Cku Lindu Baliyanto

Desain Grafis:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi

Foto:

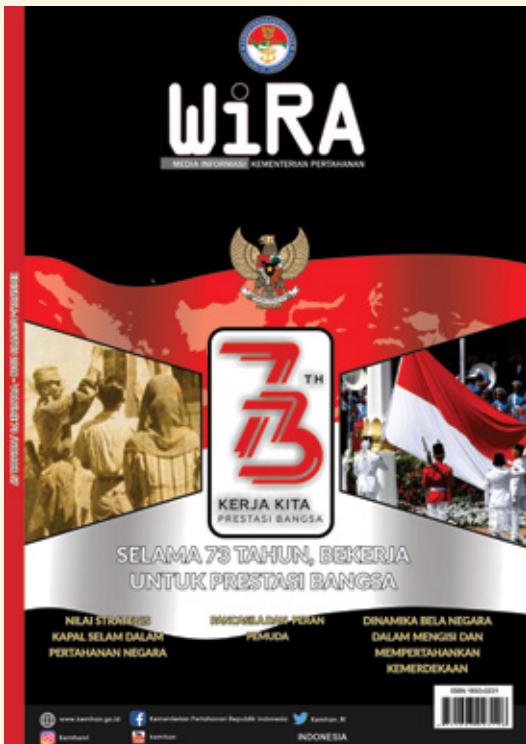
Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Distribusi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta
Telp. 021-3829151





Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA Edisi keempat bulan Juli-Agustus 2018. Tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan diantaranya: Selama 73 Tahun, Kita Bekerja Untuk Prestasi Bangsa; Nilai Strategis Kapal Selam Dalam Pertahanan Negara; Pancasila dan Peran Pemuda; Dinamika Bela Negara Dalam Mengisi Dan Mempertahankan Kemerdekaan; serta beberapa Berita Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman www.kemhan.go.id.

Daftar Isi

ARTIKEL

6

SELAMA 73 TAHUN, BEKERJA UNTUK PRESTASI BANGSA

Kemerdekaan adalah suatu "jembatan emas" atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut kamus Bahasa Indonesia, Merdeka ialah bebas dan lepas dari segala macam penjajahan. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.



14

NILAI STRATEGIS KAPAL SELAM DALAM PERTAHANAN NEGARA

Jajaran arsenal TNI Angkatan laut secara berturut turut pada tahun 2017 dan 2018 ini menerima 2 kapal selam baru dari jenis Nagabanda Class yaitu KRI 403 Nagabanda dan KRI 404 Ardadedali dari Korea Selatan.



18

PANCASILA DAN PERAN PEMUDA

Ancaman radikalisme yang semakin masif terjadi di kalangan generasi muda terdidik, khususnya mahasiswa (lihat berbagai hasil penelitian yang dilakukan LIPI, UI, Balitbangdiklat Kemenag, BIN, BNPT, dan sebagainya).

22

DINAMIKA BELA NEGARA DALAM MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Kata merdeka berasal dari bahasa Sansekerta, *maharddhika* yang berarti *rahib/biksu* atau keramat, sangat bijaksana/ alim. Pengertian tersebut sering pula dikaitkan dengan kesucian yang melekat dalam diri sang *biksu*, sebuah jabatan prestisius keulamaan dalam agama Budha.

BERITA PERTAHANAN

- | | |
|----|---|
| 32 | IIDS 2018 SALAH SATU UPAYA MENDORONG PENGUATAN DIPLOMASI PERTAHANAN |
| 34 | MENHAN, PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI HADIRI PAWAI OBOR ASIAN GAMES DI PALEMBANG |
| 35 | MENHAN RI TERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN PANGAB MALAYSIA |
| 36 | KEMHAN SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA |
| 38 | BALITBANG KEMHAN GELAR PAMERAN LITBANGHAN |
| 40 | FORUM BAKOHUMAS: MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG MAJU DAN MODERN |

SELAMA 73 TAHUN, BEKERJA UNTUK PRESTASI BANGSA

Oleh:

Muhammad. Adi.Wibowo, M.Si

Kasubbid Penerbitan Bid Kermaninfo Puskompublik Kemhan



Sumber : xdetik.com

Kemerdekaan adalah suatu "jembatan emas" atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut kamus Bahasa Indonesia, Merdeka ialah bebas dan lepas dari segala macam penjajahan. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan

nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945 silam, atas nama bangsa Indonesia . Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu Kemerdekaan. Sejak itu Bangsa

Indonesia terbebas dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengakuannya oleh dunia telah didapatkan bangsa ini dengan perjuangan berat tak kenal pamrih. Dengan modal kemerdekaan, suatu bangsa akan memiliki harga diri dan dapat bersama-sama duduk saling berdampingan dengan bangsa-bangsa di dunia.

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena

hingga tahun 2018 bangsa dan negara Indonesia masih berdiri tegak dan kembali menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaannya yang ke-73. Selama waktu 73 tahun masyarakat Indonesia sangat mampu menikmati suasana kemerdekaan tanpa adanya tindakan penjajahan dari bangsa lain yang menyelimuti bumi pertiwi Indonesia.

Bisa terbayangkan sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki keberagaman dan kemajemukan atas suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa Rahmat dan Karunia-NYA serta segala upaya keras dari seluruh komponen masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang mustahil dapat menjaga dan memelihara persatuan dari keberagaman yang ada di Indonesia.

Ungkapan rasa syukur inipun diungkapkan Presiden Republik

Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 16 Agustus 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Menurut Presiden Jokowi selama 73 tahun bangsa Indonesia sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan. Pada usia yang ke-73 tahun ini, masyarakat Indonesia terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus diakui, ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara Indonesia. Namun terlepas dari masalah itu, tetap bangsa ini harus bersyukur masih lebih baik dibanding banyak negara lain.

Walaupun banyak yang harus disyukuri, masyarakat tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai

kemajuan. Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia.

Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, membutuhkan faktor keberanian dan ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia. Implementasi ketegasan ini juga diarahkan kepada upaya untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Dukungan penerapan sinergitas dari peran Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia selalu ditegakkan dalam mencegah dan melawan terorisme.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern



Sumber : youtube.com

serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri. Sebagai negara yang besar pemerintah harus melindungi kedaulatan negara dengan membangun sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional. Tidak hanya itu, aspek kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri tidak luput dari perhatian pemerintah. Secara bertahap peningkatan kesejahteraan dilakukan sebagai upaya mendukung kinerja TNI dan Polri.

Seiring dengan penegasan Presiden Joko Widodo tersebut, Kementerian Pertahanan terus berkomitmen untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pertahanan negara dengan pelaksanaan program-program kerja Kementerian Pertahanan. Di tahun ke-4 Pemerintahan Kabinet Kerja, Kementerian Pertahanan memperlihatkan

beberapa pencapaian di bidang penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara.

Adapun pencapaian bidang penyelenggaraan Kebijakan Pertahanan Negara, meliputi lima aspek; penanaman nilai-nilai bela negara guna memperkokoh keutuhan NKRI dan mewujudkan pembangunan nasional, pencapaian Postur TNI melalui pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)* dalam rangka menghadapi ancaman, Percepatan Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (PPKT) dalam rangka pemerataan pembangunan, meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat dan meningkatkan pengiriman pasukan misi perdamaian PBB, serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

Pertama terkait penanaman nilai-nilai bela negara. Guna memperkokoh keutuhan NKRI dan mewujudkan pembangunan nasional Kementerian Pertahanan telah melaksanakan penanaman nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang dimaksud yakni meningkatkan rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara di seluruh wilayah kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Kementerian Pertahanan memiliki program pembentukan 100 juta kader dalam kurun waktu 10 tahun. Hasil dari program pembentukan kader bela negara ini sampai dengan Bulan April 2018 telah mencapai 83.424.186 kader.

Kedua terkait Pencapaian Postur TNI melalui pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)*





dalam rangka menghadapi ancaman. Melaksanakan modernisasi Alutsista, meningkatkan pemeliharaan dan perawatan, penuhan sarana prasarana dan organisasi, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta pengembangan industri pertahanan.

Pencapaian MEF tahap II dari aspek anggaran s.d TA 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar 34,35%. Proyeksi pencapaian pembangunan MEF TNI sampai dengan akhir renstra II dari aspek Alutsista adalah sebesar 75,54%. Pencapaian aspek fisik bidang Alutsista adalah sebesar 59,41%.

Pencapaian ketiga terkait dengan percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan (PPKT). Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pemerataan pembangunan Percepatan pembangunan wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil

Terdepan (PPKT) sebagai halaman depan NKRI terus dibangun dalam rangka mewujudkan pembangunan SDM untuk Indonesia maju.

Pembangunan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI berupa pembangunan Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di Kalimantan, pembangunan Pos lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka wilayah terisolir Kalimantan, Papua dan NTT, penguatan pertahanan negara di PPKT, serta penyelesaian permasalahan garis batas negara di Kalimantan.

Untuk memperlancar percepatan pembangunan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah percepatan melalui koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait. Target pembangunan JIPP pada tahun 2018 ini diproyeksikan mencapai 882,12 km atau 48,50%

dari total target sepanjang 2.019 km dan yang sudah diperkeras sepanjang 257,05 km atau 12,73%.

Keempat yakni meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat dan meningkatkan pengiriman pasukan misi perdamaian PBB. Mengoptimalkan pendidikan, pelatihan, diskusi dan dialog dengan negara-negara sahabat terutama bidang pertahanan. Peningkatan diplomasi pertahanan melalui dialog dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Selanjutnya, meningkatkan jumlah pasukan perdamaian dalam misi-misi PBB dengan target pada tahun 2019 menjadi urutan ke-10 dunia sebagai negara kontributor pasukan PBB.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam sasaran keempat tersebut antara lain Kerjasama Trilateral Indomalphi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dengan



mewujudkan Trilateral Maritime Patrol, Trilateral Air Patrol dan kerjasama latihan. Kita juga berhasil mewujudkan kerjasama multilateral "Our Eyes" dalam rangka pertukaran informasi strategi antara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura dan Thailand.

Terakhir yang kelima Komitmen membangun industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Kementerian Pertahanan berkomitmen membangun industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional sebagai sebuah bangsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang pada akhirnya bermuara kepada kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa.

Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri tentunya perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri. Eksistensi industri pertahanan pada akhirnya diarahkan untuk tujuan nasional yang lebih besar yaitu dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan eksisnya industri pertahanan, maka tidak saja kebutuhan Alpalhankam di dalam negeri akan terpenuhi akan tetapi juga akan dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam di kawasan regional maupun internasional, sehingga memberi dampak positif yang mampu memberikan efek berantai bagi pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan perkembangan ekonomi nasional serta peningkatan SDM menuju Indonesia maju. Hasil nyata yang telah dicapai antara lain adalah Pembangunan 3 unit kapal selam. Dua unit telah selesai dan unit ketiga mencapai 75%.

Semua itu merupakan prestasi dan bukti kerja Kementerian Pertahanan dalam memperkuat penyelenggaraan pertahanan negara yang berlandaskan semangat kerja kita untuk prestasi bangsa, yang menjadi tema peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tahun 2018 Istimewa Bagi Bangsa Indonesia

Prestasi-prestasi program kerja dari Kementerian Pertahanan yang ditorehkan kepada Negara Indonesia tersebut, sangat relevan dengan tema perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-73 tahun Kemerdekaan RI kali ini, yakni "73 Tahun, Kerja Kita Prestasi Bangsa". Disamping itu tema ini juga sangat relevan karena tahun 2018 ini adalah tahun yang istimewa bagi Indonesia. Selain bertepatan dengan 73 tahun Kemerdekaan RI, masyarakat juga menyambut ajang

Asian Games XVIII dimana Indonesia diberi kepercayaan kembali untuk menjadi tuan rumah setelah 56 tahun.

Tema ini, mengandung 2 substansi utama yang berkaitan, yaitu "Energi" dan "Kerja". Energi yang berarti sumber semangat (secara internal) dan memancar keluar (secara eksternal) dari titik fokus. Kerja memiliki arti selalu bergerak/aktif. Tema Energi diambil dari identitas Asian Games XVIII yaitu "*The Energy of Asia*". Sementara tema Kerja merupakan cerminan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo selama 4 tahun terakhir untuk perubahan yang lebih baik. Lebih jauh melalui tema ini mengisyaratkan bahwa kerja dan energi adalah suatu kesatuan yang saling melengkapi. Selain itu,

diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia agar terciptanya semangat dalam bekerja bersama membangun negeri dan semangat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi dunia. Semangat dalam bekerja bersama membangun negeri ini memiliki esensi sekaligus ajakan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk mengedepankan atas kebersamaan. Melalui semboyan ini pula masyarakat diingatkan untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan untuk menjadi bangsa yang terhormat, Bangsa Indonesia.

Adanya masa kemerdekaan, bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai. Tetapi, justru muncul tantangan baru

untuk mempertahankan dan mengisinya dengan berbagai kegiatan pembangunan. Sama halnya dengan apa yang dikatakan *Founding Father* kita Bung Karno bahwa kemerdekaan itu diartikan sebagai pintu gerbang kebebasan. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tentunya harus diisi dan dipertahankan. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dapat melalui berbagai cara, salah satunya pembangunan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. ***



18th ASIAN GAMES Jakarta Palembang 2018

"The Energy of Asia"

Sumber : toptier.id

Dalam menyemarakkan hari kemerdekaan, Kemhan mengadakan beberapa perlombaan yang diikuti oleh para Eselon 2 sampai anggota yang berdinas dilingkungan Kemhan.





NILAI STRATEGIS KAPAL SELAM DALAM PERTAHANAN NEGARA

Oleh:
Joko Ismoyo
Jurnalis Media Radio

Jajaran arsenal TNI Angkatan laut secara berturut turut pada tahun 2017 dan 2018 ini menerima 2 kapal selam baru dari jenis Nagabanda Class yaitu KRI 403 Nagabanda dan KRI 404 Ardadedali dari Korea Selatan. Walaupun sejatinya kapal selam ini masih satu kelas dengan 2 unit kapal selam

sebelumnya dari Cakra Class yaitu type 209, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Pada KRI 401 Cakra dan KRI 402 Nenggala, dipesan dengan kondisi sama persis dengan deskripsi pembuatnya dari galangan Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), Jerman. Sementara Nagabanda Class dibuat di Daewoo

Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) berdasarkan desain dari tim TNI Angkatan Laut sehingga tidak lagi bisa disamakan dengan Chang Bogo Class yang pada awalnya ditawarkan.

Terlepas dari dimilikinya 2 varian yang sama sama mengusung



type 209, apakah dengan bertambahnya kapal selam TNI Angkatan Laut seketika dapat merubah peta proyeksi pertahanan dimasa mendatang? jawabannya adalah ya dan pasti. Negara yang memiliki kapal selam dapat dinilai sebagai negara yang serius dalam memandang pentingnya alutsista. Mengapa? Berbeda dengan kapal perang permukaan yang dapat dilihat dengan mata dan terpantau radar secara terus menerus, kapal selam justru sebaliknya. Kapal selam bekerja secara misterius, tidak terdeteksi dan tidak diketahui misi yang diembannya. Dengan keunggulan tersebut, banyak negara

yang berusaha untuk mencari penangkalnya. Baik dengan cara memiliki kapal selam atau memiliki satuan armada anti kapal selam.

Kapal selam selain berfungsi sebagai penyerang, pertahanan, juga bisa dikaryakan membawa misi rahasia. *Nagabanda Class* dengan kemampuannya beroperasi selama 52 hari mampu menempuh jarak ekonomis sejauh 740 km. Kapal selam dapat memasuki wilayah negara lain tanpa harus menampakkan diri. Kemudian dijarak aman, kapal selam mengeluarkan muatannya tergantung apa misi yang diembannya. Tidak heran apabila ada bandar narkotika juga membuat kapal selam secara swadaya untuk membawa narkotika melalui jalur sungai.

Dikawasan Asia Tenggara, Indonesia terlebih dahulu yang memulai kepemilikan kapal selam dalam jajaran angkatan perang. Tidak tanggung tanggung sebanyak 12 kapal selam dari *Whiskey Class* didatangkan dari Uni Soviet untuk mendukung operasi Trikora. Pada dekade dekade berikutnya negara disekitar Indonesia juga melakukan hal yang serupa. Dikawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura juga memutuskan memiliki kapal selam, begitupula dengan Australia disisi selatan. Kehadiran kapal selam secara tidak langsung memunculkan perlombaan senjata. Memiliki kapal selam dinilai tidak cukup untuk menghadapi kapal selam karena dalam sejarah perang, belum ada referensi yang menyebutkan ada peristiwa pertempuran antar kapal selam. Maka jawabannya adalah desakan untuk memiliki alutsista anti kapal selam selain kapal selam.

Kapal perang anti kapal selam dengan indra sonar merupakan salah satu jawaban untuk menangkal kapal selam. Namun kapal perang anti kapal selam tidak cukup memadai karena keterbatasan pengindraan. Dibutuhkan lebih dari 1 kapal perang anti kapal selam untuk dapat menentukan titik koordinat kapal selam. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini indra sonar sudah dapat dibawa oleh helikopter dan pesawat terbang. Ketiga alutsista tersebut juga membawa torpedo atau bom lau untuk menghancurkan kapal selam.

Namun, tetap saja itu tidak mudah. Dengan dimilikinya kemampuan kapal selam yang dapat melakukan serangan target dibawah air dan dipermukaan air, kapal selam sudah memiliki arena pertempuran sendiri yang dapat bergerak secara terpisah dan mandiri dalam melaksanakan operasi. Adanya kepemilikan kapal selam, juga memaksa negara lain harus memiliki kumpulan alutsista khusus yang didedikasikan untuk pertempuran bawah laut. Tidak murah dan juga tidak mudah untuk menemukan kapal selam yang bergerak secara tidak kasat mata.

Tidak hanya pada masa perang kapal selam dinilai merepotkan, dimasa damaipun ada beberapa kali insiden yang melibatkan kapal selam atau diduga kapal selam terungkap dari pemberitaan.

Berkaca dari pengalaman operasi dan insiden yang melibatkan kapal selam, doktrin pertahanan Indonesia harus melangkah lebih maju khususnya dalam mengantisipasi dan menghadapi





perang anti kapal selam. Kekuatan TNI Angkatan laut telah memiliki asset berupa kapal perang yang dilengkapi sonar berikut senjata bawah air, helikopter anti kapal selam serta pesawat terbang patroli maritim. Dengan kemampuan deteksi dan antisipasi yang dimiliki saat ini, TNI tidak lantas berpuas diri namun harus terus memperkaya diri dengan belajar mengenai doktrin perang anti kapal selam yang dimiliki negara lain sekaligus memperkuat kemampuan alutsista TNI.

Keinginan Indonesia untuk dapat memproduksi kapal selam

secara mandiri sungguh merupakan program yang harus diapresiasi. Teknisi PT PAL saat ini sudah mampu merakit kapal selam ketiga yang merupakan kelanjutan dari *Transfer of Technology* dari Korea Selatan. Walaupun ketiga modul diproduksi di Korea Selatan, namun teknisi PT PAL telah membuktikan berhasil menyatukan ketiga modul tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Diharapkan pada tahun 2019 mendatang, kapal selam buatan PT PAL sudah dapat diserahkan ke TNI Angkatan laut setelah menjalani uji coba laut.

Tentunya tidak bisa dibandingkan

kelebihan ataupun kekurangan 2 tipe kapal selam yang dimiliki TNI AL pada saat ini. *Cakra Class* yang hadir pada tahun 1981, sampai dengan saat ini masih aktif dan telah banyak merasakan asam garam dalam tugas operasi. Pengalaman ini tidak bisa dibandingkan dengan *Nagabanda Class* yang secara resmi baru diterima pada tahun 2017. Dengan segala kelebihan yang dimiliki *Nagabanda Class*, kapal selam ini harus bisa membuktikannya pada operasi operasi yang nanti akan dibebankan kepadanya.***



PANCASILA DAN PERAN PEMUDA

Oleh:

Letkol Inf Drs Sabar Simatupang, M.Si

Akademisi Universitas Pertahanan dan Alumnus Magister KSKN UI



Sumber: denidesain.pkl

Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018 dan juga masih dalam rangkaian perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2018 kali ini, terdapat suatu "keprihatinan yang mendalam" di benak kita. Hal ini terkait dengan fakta bahwa di tengah masyarakat masih saja terlihat indikasi radikalisme (terorisme), liberalisasi, pragmatisme, dekadensi moral dan rasa kebangsaan, terutama pada sebagian generasi muda. Pertanyaannya bagaimana para pemuda sekarang dan ke

depan memaknai nilai perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif ideologis?

Dalam konteks ini tawaran program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan), khususnya bagi generasi muda Indonesia semakin menemukan relevansinya. Salah satu nilai dasar yang sangat fundamental dalam PKBN tersebut adalah "yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara". Untuk

itu posisi strategis yang aktual disarankan bagi pemuda saat ini dan ke depan adalah menjadi pelopor kebangsaan dalam pengimplementasian ideologi negara Pancasila di setiap bidang pengabdianya.

Ironi Orde Reformasi

Semenjak lengsernya mantan Presiden Suharto pada tahun 1998 (berarti berakhirnya pemerintahan Orde Baru), tampak muncul suatu ironi kecenderungan yang kontra

produktif dengan ide awal gagasan Reformasi Total pemerintahan baru. Pemerintahan Orde Baru yang tadinya dianggap gagal mempertahankan eksistensi ideologi negara dan kesejahteraan masyarakat, akhirnya semua kebijakan politiknya (termasuk PKBN) ditolak oleh penggagas Orde Reformasi.

Setelah 20 tahun Orde Reformasi sudah berjalan, pembaharuan (reformasi) politik dan hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat muncul tendensi yang menunjukkan terjadinya dekadensi moral (sosial budaya), ideologis, politik dan hukum di kalangan masyarakat luas, khususnya generasi muda. Hal ini bisa diamati dengan semakin masifnya pelibatan generasi muda di berbagai kasus narkoba, korupsi, terorisme, kriminalitas, dan tindak pidana lainnya.

Bila kita memetakan secara ideologis kecenderungan pola pikir dan sikap masyarakat saat ini, maka ada beberapa ancaman yang semakin intensif terjadi.

Pertama, ancaman radikalisme yang semakin masif terjadi di kalangan generasi muda terdidik, khususnya mahasiswa (lihat berbagai hasil penelitian yang dilakukan LIPI, UI, Balitbangdiklat Kemenag, BIN, BNPT, dan sebagainya). Fenomena ini jelas sangat dikuatirkan semakin meluas melalui medsos dapat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi penerus terutama anak-anak dan remaja (tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas).

Indikasi keterpengaruhannya ini antara lain dapat dilihat dari berbagai fakta keterlibatan beberapa aktifis keagamaan dari kalangan mahasiswa/pemuda/

remaja menjadi pelaku teror dan relawan/simpatisan pengikut ISIS yang sempat berangkat ke Suriah, munculnya sikap intoleran dan memudarnya kesadaran ideologis Pancasila di sebagian pemuda, kurangnya minat mahasiswa/pelajar terhadap aktifitas yang bertemakan nasionalisme/patriotisme, dan sebagainya.

Kedua, ancaman neoliberalisme sebagai anti tesa bagi deideologisasi Pancasila di kalangan masyarakat. Pesatnya kemajuan Ilpengtek (modernisasi), selain dapat berdampak positif, dikuatirkan berimplikasi negatif bagi kalangan generasi muda. Indikasi maraknya dekadensi moral (kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba, pornografi) sebagai akibat (*side effect*) dari kemajuan teknologi informatika di kalangan pemimpin politik saat ini, ternyata secara psikologis dapat berakibat fatal dan



Sumber: beritadaerah.co.id



menyimpang bagi alam pikir dan sikap generasi muda.

Ketiga, meskipun hal ini dianggap "debatable" di kalangan penolak rezim Suharto, sadar tidak sadar kecenderungan kembalinya pengaruh faham (reideologisasi) komunisme bisa saja terjadi pada sikap pragmatisme, sinisme dan frustasi pemuda, terhadap situasi kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai alternatif bagi efek negatif dari dampak pengaruh Neo-liberalisme, kemunculan pengaruh faham tersebut mungkin saja mendapat tempat di kelompok masyarakat tertentu.

Keempat, menguatnya nilai-nilai primordialisme (SARA) yang dipolitisasi oleh kalangan elite-elite politik dan masyarakat akan berbahaya dapat mempengaruhi alam pikiran dan perilaku generasi muda. Apabila kecenderungan ini tidak dapat dikendalikan (mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen), maka secara akumulatif akan rentan bagi terjadinya disintegrasi bangsa dan kehancuran negara di masa yang akan datang.

Kelima, walaupun ancaman fasisme/totalitarianisme dan otoritarianisme saat ini belum menimbulkan kondisi nyata pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tetapi tantangannya bisa terjadi pada perilaku (praktek berideologi) di kalangan pemimpin politik/ormas negeri ini. Dialektika pemahaman ideologis menyangkut hal ini tentunya secara akademis perlu dikaji kembali, agar generasi muda tidak terjebak pada sikap pragmatisme dan otoritarianisme kekuasaan. Fasisme pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemasukan kekuasaan yang tunggal dan orientasi otoriterisme yang menyalahgunakan kekuatan militer.

Upaya Revitalisasi

KONSEPSI Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dianut oleh Indonesia secara mendasar mengacu kepada konstitusi NKRI (UUD 1945). Dalam konstitusi ini disebutkan bahwa semangat dan upaya Bela Negara merupakan hal yang vital (hak dan kewajiban) bagi semua warga negara Indonesia (Pasal 27 ayat 3 UUD

1945). Konsepsi PKBN ini secara substansial mengandung 5 (lima) nilai dasar, yaitu Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dan Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

Dalam rangka untuk mensosialisasikan kembali PKBN ini, perlu dilakukan langkah-langkah nyata revitalisasi dan implementasi terhadap konsepsi nilai-nilai Bela Negara tersebut. Agar tidak terkesan dogmatis atau doktriner, konsepsi Bela Negara ini sebaiknya diformulasikan kembali. Hal ini agar sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu upaya revitalisasi konsepsi Bela Negara ini adalah bagaimana pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara relevan dengan perubahan dinamika ancaman yang nyata saat ini. Beberapa dinamika ancaman ideologis yang mengemuka telah diuraikan secara gamblang di atas.

Untuk merevitalisasi konsepsi

Bela Negara khususnya nilai Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara di kalangan generasi muda, dapat ditempuh beberapa langkah strategis berikut ini. Pertama, Presiden dan semua lembaga tinggi pemerintahan lainnya perlu segera untuk merumuskan payung hukum yang menjadi *legal standing* (berupa peraturan perundang-undangan khusus) bagi penyadaran kembali pentingnya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Upaya ini tentunya lebih ditujukan kepada kalangan generasi muda penerus bangsa Indonesia, yaitu kelompok pemuda, remaja dan anak-anak.

Kedua, semua kementerian perlu merumuskan ulang kembali (revitalisasi) metode dan program

yang tepat (yaitu aktual, adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman) dalam pembinaan kesadaran Ideologi Pancasila yang sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Perumusan pembinaan ideologi yang khusus bagi generasi muda hendaknya dipelopori oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga bersama-sama dengan BPIP serta didukung oleh kementerian yang lain. Hal ini juga dilakukan bersama oleh Badiklat dan Balitbang yang ada di tiap kementerian, tentunya secara fungsional di bawah koordinasi setiap kemenkonya, sehingga dapat diselaraskan kepada penjabaran kebijakan dan program kerja pemerintahan.

Ketiga, semua pemangku kepentingan dalam pendidikan nasional di Indonesia sudah

saatnya untuk menyeragamkan kembali penjabaran materi Ideologi Pancasila dalam kurikulum pembelajaran pada setiap tingkat pendidikan secara nasional. Penjabaran ini harus disesuaikan kepada ancaman dan tantangan ideologis yang benar-benar rentan pada kondisi kemajemukan (pluralisme) masyarakat Indonesia dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis yang terus terjadi serta serba cepat. Sehingga nantinya setiap pemuda diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman Ideologi Pancasila ini dalam kehidupan pengabdianya masing-masing kelak. Dirgahayu Hari Lahir Pancasila dan Kemerdekaan RI 2018.***

NILAI-NILAI DASAR DALAM BELA NEGARA

- CINTA** **TANAH AIR**
- SADAR** **BERBANGSA DAN BERNEGARA**
- YAKIN** **PADA PANCAKILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA**
- RELA** **BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA**
- MEMILIKI** **KEMAMPUAN AWAL** **BELA NEGARA**



DINAMIKA BELA NEGARA DALAM MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Oleh:

Mayor Ckm Dr. Achmed Sukendro, S.H.,M.Si

Dosen Prodi Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

Kata merdeka berasal dari bahasa Sansekerta, *maharddhika* yang berarti rahi/biksu atau keramat, sangat bijaksana/ alim. Pengertian tersebut sering pula dikaitkan dengan kesucian yang melekat dalam diri sang biksu, sebuah jabatan prestisius keulamaan dalam agama Budha. Itu berarti ada proses otonomisasi individu, telah melepaskan diri dari belenggu yang merampas kekeramatan dan kehormatannya. Atau dengan kata lain merdeka bisa diinterpretasi sebagai realitas baru masing-masing individu atau rakyat terlepas dari segala bentuk keterkungkungan.

Kemerdekaaan adalah pintu gerbang, kata Bung Karno. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia harus diisi dan dipertahankan. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang bertujuan sesuai cita cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan salah satu

bentuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Bela negara merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 ayat 30.

Bela negara dilakukan oleh seluruh warga negara dimulai dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara legal formal. Bela negara tidak hanya dilakukan ketika negara menghadapi permasalahan kedaulatan atau masa konflik atau perang namun dalam masa damai dan mengisi kemerdekaan bela negara tetap dilaksanakan. Bela negara dilakukan dalam berbagai kondisi bangsa

Indonesia, bela negara mengalami dinamika seiring dinamika yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa yang besar baik dari isi wilayah maupun komposisi dan jumlah penduduk atau warga negara, masyarakat Indonesia mengalami dinamika politik sosial ekonomi pertahanan, budaya, ideologi, keamanan dan hubungan luar negeri. Tulisan ini akan memaparkan dinamika bela negara dalam mengisi kemerdekaan dalam sisi dinamika politik, sejak kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini.

Dinamika Bangsa Indonesia

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya. Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari

keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, perasaan serta daya tahannya untuk menghadapinya.

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu berubah (dinamis). Kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial. Menurut More (Narwoko, 2007: 362) perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan nilai, norma, dan fenomena kultural. Sebuah perubahan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia yang menjadi dinamika kehidupannya. Yang menjadi perbedaan adalah perubahan tersebut terjadi secara cepat atau lambat, bahkan seseorang atau sekelompok orang

sekalipun yang hidup di daerah terpencil pasti akan mengalami dinamika kehidupan. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor (Salam, 2010: 258), antara lain:

1. Penyebaraan informasi. Meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran).
2. Modal. Antara lain Sumber Daya Manusia ataupun modal finansial
3. Teknologi. Suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Ideologi atau agama. Keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial.



Sumber: vik.kompas.com

5. Birokrasi. Terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya.
6. Agen atau aktor. Hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam "mencari" kehidupan yang lebih baik.

Dinamika terwujud dalam proses internalisasi dan eksternalisasi. Tidak mungkin ada masyarakat yang tidak memiliki tendensi untuk selalu mereposisi untuk menentukan masa depannya, sebuah masyarakat adalah sebuah entitas yang bergerak tanpa henti.

Sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia mengalami dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pertahanan

keamanan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan semenjak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini. Dalam bidang politik dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sangat terasa. Dinamika bangsa Indonesia dalam bidang politik juga dipengaruhi faktor teknologi, ideologi, birokrasi dan penyebaran informasi. Secara keseluruhan bangsa Indonesia mengalami 3 (tiga) dinamika politik yakni era Orde Lama, era Orde Baru dan era Reformasi.

Bela Negara Era Orde Lama (1945-1969).

Usai proklamasi kemerdekaan, Indonesia dibawah pimpinan Ir Soekarno, mengalami situasi politik berbangsa dan bernegara yang didominasi upaya mempertahankan kemerdekaan. Ancaman militer dari luar kembali dihadapi

masyarakat. Ancaman dari luar, seperti kembalinya negara penjajah (Belanda) dan pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhir tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer ke-2. Yogyakarta yang pada waktu menjadi ibukota negara, diduduki Belanda. Presiden Soekarno-Hatta ditawan dan tentara keluar kota Yogyakarta bergerilya dipimpin Panglima Besar Soedirman. Soekarno-Hatta mengirimkan telegram berbunyi: "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi belanda telah moelai serangannya atas Iboe Kota Yogyakarta. Dijika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannya, kami mengoesakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara. Menteri



Sumber: kalselwordpress.com

Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.

Telegram tak sampai ke Bukittinggi, tapi saat bersamaan Mr Syafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif. Dalam sebuah rapat di dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948, diusulkan dibentuk PDRI. Gubernur Sumatra, Mr T.M Hasan menyetujui usulan itu demi menyelamatkan Negara RI. PDRI dijuluki penyelamat republik.

TNI sebagai komponen utama bela negara bukan dibentuk oleh negara ketika negara Indonesia secara resmi terbentuk pada 17 Agustus 1945. Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada mulanya hanyalah sebuah organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 5 Oktober 1945 berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian diubah lagi menjadi

Tentara Republik Indonesia (TRI). Di masa-masa pertahanan kemerdekaan, banyak laskar-laskar perjuangan atau badan perjuangan rakyat yang dibuat oleh rakyat untuk melindungi diri. Sambil terus bertempur dan berjuang demi menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan bangsa, pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan TNI.

Pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), demi mempersatukan dua kekuatan bersenjata yakni antara TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat secara resmi agar lebih memperkuat sistem pertahanan. Diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949 di kota Den Haag, memberikan perubahan terhadap Indonesia menjadi sebuah negara federasi yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sejalan dengan hal tersebut, maka dibentuklah Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan penggabungan dari TNI dan KNIL. Setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia menjadi negara kesatuan seperti semula, kemudian APRIS berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pada 1962, dilakukan sebuah upaya penggabungan antara APRI dan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang utuh bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Rakyat sebagai komponen cadangan dalam bela negara membentuk organisasi kepemudaan kepanduan. Pada kurun waktu tahun 1950-1960 organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya, bahkan diantaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip



Sumber: suratkabar.id

dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan jaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan Bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan Bangsa.

Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS, untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu beliau menyatakan pembubaran

organsiasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama GERAKAN PRAMUKA yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indoneisa.

Gerakan Pramuka dengan lambang TUNAS KELAPA dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugrahkan Panji Gerakan Pramuka dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

448 Tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka.

Dalam upaya mengerahkan rakyat ikut membantu komponen utama/ABRI dalam mempertahankan kedaulatan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPPU Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1962) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 1962 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 2492 Tahun 1962).



Sumber: mursydriva.wordpress.com



Sumber: menwawiradharma.blogspot.com

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawan Rakyat (WANRA) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota *International Civil Defence Organisation (ICDO)*, yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi Pertahanan Sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya kita jadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil (HUT HANSIP).

Mahasiswa sebagai salah satu komponen rakyat juga ikut serta dalam upaya bela negara. Jenderal Besar A.H. Nasution. Tanggal 13 Juni - 14 September 1959 memerintahkan diadakan

wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan *home-front* dan bila perlu ikut memanggul senapan ke medan laga. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH MAHASISWA) dididik di Kodam VI Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Kommando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat meyambut komando ini dengan gagap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswanya.

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan

Tinggi. Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi , maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI Siliwangi. Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infanteri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati. Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari kodam VI/SLW.

Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962 - 1963

termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/I Jabar(Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit – prajurit TNI (sekarang Secaba Dam III/Slw, Bihbul). Satuan – satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih – pelatih dari RINSIL. 12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan Jenderal A. H. Nasution yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

Bela Negara Era Orde Baru (1967-1998)

Krisis ekonomi dan krisis ideologi (era perang dingin) ikut melanda Indonesia. Terjadi pemberontakan G 30S/PKI yang berlandaskan ideologi komunis. Pemerintahan Ir Soekarno berganti ke Pemerintahan Presiden Soeharto. Ancaman pertahanan dan keamanan negara bukan lagi dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan atau kembalinya negara penjajah namun krisis ekonomi dan krisis ideologi. Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Soeharto menfokuskan pengisian kemerdekaan dengan pembangunan ekonomi dan ideologi. Bela negara pada masa era Soekarno dilanjutkan dan ditingkatkan. ABRI sebagai komponen utama selain sebagai kekuatan pertahanan juga mengembangkan fungsi sosial politik.

Pada tahun 1972, berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1972, organisasi Pertahanan Sipil

disempurnakan menjadi organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) dan organisasi Perlawan Rakyat dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata.

Sesuai dengan Keppres tersebut, fungsi utama Pertahanan Sipil meliputi bidang-bidang (1) Perlindungan Masyarakat (2) bidang Ketahanan Nasional (3) bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (4) bidang Produksi. Berdasarkan Keppres No.56 Tahun 1972, pembinaan organisasi Pertahanan Sipil yang bersifat non kombatan diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri,

sementara pembinaan organisasi perlawan rakyat dan keamanan rakyat yang bersifat kombatan tetap berada di Departemen Pertahanan Keamanan.

Sebagai tindak lanjut dari dua Keppres di atas, Menhankam / Pangab dan Mendagri dengan Keputusan Bersama Nomor Kep/37/IX/1975 dan Nomor 240 A Tahun 1975 telah menggariskan bahwa tugas pokok Hansip, Kamra dan Wanra adalah :

1. Hansip membantu dan memperkuat pelaksanaan Hankamnas di bidang Perlindungan Masya-rakat;



Sumber: desamulyorejo.wordpress.com

2. Kamra membantu Polri dalam tugasnya dibidang Pemeliharaan Kamtibmas serta operasi Kamtibmas;
3. Wanra membantu TNI dalam tugas operasi militer, baik dalam rangka operasi.

Pada 19 Januari 1978 dikeluarkan lagi SKB 3 menteri tentang juklak pembinaan organisasi Resimen Mahasiswa. Untuk memulihkan kehidupan mahasiswa dari kegiatan politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang keilmuan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr Daoed Yoesoef mengeluarkan surat keputusan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yang diikuti dengan SK No. 0230/U/J/1980 tentang pedoman umum organisasi dan keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Pemerintah Orde Baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, adalah karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Setelah bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunnya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warganegara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan

kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang wajib dipatuhi.

Era Reformasi (1999 - Sekarang)

Dinamika politik dunia, berakhirnya era perang dingin, globalisasi, era demokratisasi yang menembus batas-batas negara dan krisis ekonomi melanda dunia di era tahun 1998. Indonesia juga mengalami dampak globalisasi, krisis ekonomi dan kemajuan teknologi informasi serta era demokratisasi. Pemerintah Soeharto yang dianggap terlalu lama perlu diganti dan sistem pemerintahannya direformasi.

Dalam kehidupan berbangsa, dampak reformasi tidak semuanya positif. Euforia kebebasan yang berlebihan mengakibatkan kemunduran dalam bidang hukum, wawasan kebangsaan dan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Hampir semua yang pernah ada di pemerintahan Odre Baru cenderung dihilangkan dan ditinggalkan. Kegiatan-kegiatan bela negara pun cenderung tiada.

Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Intruksi Presiden no 2 Tahun 1999 Tentang pemisahan Polri dari ABRI. Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR memperkuat pemisahan Polri dari ABRI dengan mengeluarkan TAP MPR No VI/2000. Pada Tanggal 1 April 1999 di Mabes ABRI Cilangkap, secara resmi Pangab Jenderal TNI Wiranto memimpin upacara pelepasan POLRI dari ABRI. Semenjak saat itu komponen utama bela negara adalah Tentara Nasional Indonesia/TNI.

Kegiatan bela negara bagi mahasiswa digiatkan kembali

dengan mengeluarkan Keputusan bersama tiga Menteri yaitu Menhan, Mendiknas, dan Mendaagri dan Otda No: KB/14M/X/2000, No:6/U/KB/2000, dan No : 39 A tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Pemerintah pimpinan Presiden Dr. Soesilo Bambang Yoedhoyono membuat program revitalisasi gerakan Pramuka. Revitalisasi gerakan Pramuka didasarkan kenyataan bahwa terjadi kemunduran gerakan pramuka yakni : eksistensi dan peran gerakan pramuka yang makin berkurang dan keterlambatan menyesuaikan diri atas perubahan yang terjadi. Gerakan Revitalisasi Pramuka diawali penerbitan Keppres RI Nomor 104 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, dilanjutkan pencanangan revitalisasi gerakan pramuka oleh Presiden Dr. Soesilo Bambang Yoedhoyono pada tanggal 14 Agustus 2006.

Ajakan Presiden Republik Indonesia dalam Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah : perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa, raih keberhasilan melalui kerja keras secara cerdas dan ikhlas, ajak kaum muda meningkatkan semangat bela negara,mantapkan tekad kaum mudas sebagai patriot pembangunan. Utamakan kepentingan Bangsa dan Negara diatas segalanya, kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia serta amalkan Satya dan Dharma Pramuka. Pada 18 Desember 2006, Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal terbentuknya PDRI, sebagai Hari Bela Negara.

Dinamika dunia dan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat dratis dari masa ke masanya. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi berupa media sosial untuk masa sekarang ini akan lebih bervariasi dan penuh tantangan untuk mewujudkan bentuk fisik Bela Negara. Dampak media sosial bukan hanya secara positif mampu mendukung kehidupan dengan mudah dan cepat namun juga mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bibit-bibit intoleran, radikalisme, proses tergerusnya wawasan kebangsaan juga mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Meskipun terlepas dari seluruh tantangan fenomena yang ditampilkan tersebut, disadari atau tidak disadari masyarakat harus tetap dapat menyikapi perkembangan yang terjadi serta selalu harus dapat mengambil sisi positif, dan meninggalkan sisi negatifnya.

Disamping itu bentuk-bentuk atau wujud bela negara harus terus dilakukan oleh anak bangsa, dengan cara mencintai budaya Indonesia melebihi budaya luar negeri, memperkenalkan budaya Indonesia di kancah Internasional dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi seperti jejaring sosial.

Untuk kalangan generasi pemuda bentuk bela negara yang bisa dilakukan adalah dengan mengemukakan aspirasi yang disertai dengan tanggung jawab bereksresi, menjaga nama baik keluarga, lembaga serta negara Indonesia. Berbagai cara lain yang dapat diimplementasikan adalah melatih kemampuan intelektual dengan proses belajar mengajar sungguh-sungguh agar bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, ikut serta dalam menanggulangi bencana alam dan peduli sosial, menjaga keutuhan dan keamanan

negara dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjaga ancaman dari negara lain.

Upaya mengaplikasikan wujud bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat Indonesia demi mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang aman dan kokoh dari serangan maupun ancaman. Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* bela negara, terus secara aktif mensosialisasikan program pembinaan kesadaran bela negara dan mendidik kader-kader bela negara dari berbagai lapisan masyarakat dan profesi. Sekali lagi, masyarakat Indonesia patut memahami bersama bahwa Bela Negara bukanlah tindakan militerisme atau wajib militer namun secara keseluruhan bagian dari penanaman nilai-nilai bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia.***





FORUM KOMUNIKASI BAKOHUMAS



IIDS 2018 SALAH SATU UPAYA MENDORONG PENGUATAN DIPLOMASI PERTAHANAN



Tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Diperlukan kebersamaan diantara negara-negara di dunia untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bentuk nyata dari kebersamaan itu dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mendorong penguatan diplomasi pertahanan.

Indonesia Internasional Defense Science Seminar (IIDS) adalah bagian penting dalam upaya memperkuat diplomasi pertahanan. Untuk itu Menko Polhukam Wiranto saat membuka IIDS 2018, Rabu (11/7), di Jakarta, mengajak untuk menggali bersama pemikiran ilmiah dan akademis sebagai peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama.

Menko Polhukam berharap melalui seminar yang berlangsung dua hari mulai tanggal 11-12 Juli ini, dapat menghasilkan pemikiran, inspirasi dan dorongan

bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat diplomasi pertahanan baik di kawasan regional maupun global. Mengingat dua aspek utama dari defense science yang ditawarkan dalam IIDS 2018 ini sangat penting untuk dikaji, baik dari perspektif defense studies maupun dari perspektif defense technologies.

Dalam kesempatan yang sama, Menhan Ryamizard Ryacudu saat mendampingi Menko Polhukam mengapresiasi upaya UNHAN Indonesia atas diselenggarakannya IIDS 2018 ini. Menhan berharap konsep diplomasi pertahanan kawasan melalui kalibrasi ulang tatanan arsitektur keamanan





kawasan Indo Pacific menjadi urgensi yang perlu segera direalisasikan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menavigasi setiap ancaman dan tantangan di kawasan dengan tepat, benar dan profesional.

Menhan berkeyakinan dalam menyikapi perkembangan ancaman di kawasan jika dilakukan dengan niat baik dan pikiran jernih serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik secara bersama-sama. Menutup sambutannya Menhan berpesan untuk selalu memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan agar dapat memberikan arah yang benar dalam pengelolaan keamanan regional untuk kepentingan bersama.

Sementara itu Rektor UNHAN Indonesia Letjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A menyampaikan bahwa IIDS merupakan seminar internasional yang diadakan dalam rangka mengatasi tantangan keamanan global ditinjau dari perspektif diplomasi pertahanan. Rektor berharap melalui seminar yang diikuti kurang lebih 1000 orang peserta ini, dapat memberikan



kontribusi dalam pengembangan ilmu pertahanan.

IIDS 2018 kali ini menghadirkan 24 orang pembicara terdiri dari 14 pakar luar negeri dimana 3 diantaranya dari organisasi internasional dan 7 dari Indonesia. Tiga hal yang menjadi sasaran seminar yaitu sukses akademik, sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Adapun fokus pencapaian pada pengakuan ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu yang setara dengan rumpun ilmu lainnya secara nasional dan internasional. Selain itu juga

diakuiinya kemampuan UNHAN dalam menyelenggarakan event internasional yang memiliki standar tinggi.

Dari tema yang diangkat yaitu, "Strengthening Defense Diplomacy to Address Common Security Challenges," terdapat 6 topik seminar dengan komposisi pembahasan yaitu 12 dari perspektif defense studies dan 12 perspektif defense technologies sesuai basis pengembangan ilmu pertahanan.***

MENHAN, PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI HADIRI PAWAI OBOR ASIAN GAMES DI PALEMBANG



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri Acara Torch Relay atau Pawai Obor Asian Games XVIII 2018 di Palembang, Sabtu (4/8). Turut hadir Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir dan Wakil KOI Muddai Madang.

Bertempat di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Menhan berkesempatan menyerahkan Obor Asian Games XVII 2018 kepada Gubernur Sulsel untuk selanjutnya diarak pawai mengelilingi kota Palembang.

Acara Pawai Obor Asian Games di Palembang didahului dengan Akrobatis Udara oleh Marsdaya TNI

(Purn) Eris Herryanto dilanjutkan dengan Penerjunan Api Obor dan Bendera Protokol oleh TNI AU dan FASI.

Penerjun TNI AU membawa tider dan bendera Protokol yang diserahkan kepada Marsekal Pertama Eko Dono selaku Pimpinan Penerbangan Api Obor Asian Games Torch Relay (AGTR) dari New Delhi India sampai dengan Palembang. Selanjutnya, diserahkan kepada Panglima TNI yang diteruskan dengan menyalaikan api di Mini Coulron. Pawai Obor Asian Games XVIII 2018 di Palembang dimulai ketika Menhan menyerahkannya api obor kepada Gubernur Sulsel.

Selanjutnya Gubernur Sulsel berlari sekitar 50 meter dan

menyerahkan obor ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seterusnya diserahkan secara estafet 30 pelari inti yang melakukan estafet pawai obor Asian Games 2018 di Palembang. Obor Asian Games kemudian diarak secara estafet menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengelilingi kota Palembang.

Pawai Obor Asian Games XVIII 2018 di Palembang tersebut tidak hanya mengelilingi kota Palembang namun juga berkeliling di sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Masyarakat Palembang antusias menyambut pawai obor Asian Games. Mereka hadir di sepanjang jalan yang dilalui pawai.***

MENHAN RI TERIMA KUNJUNGAN KEHORMATAN PANGAB MALAYSIA



Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Dato Sri Panglima Haji Zulkifli Bin Haji Zainal Abidin, Kamis (9/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kunjungan Panglima Angkatan Tentera Malaysia kepada Menhan RI ini dilakukan disela-sela agendanya menghadiri Sidang ke-14 *Malaysia Indonesia High Level Committe* (*Malindo HLC*) bersama Panglima TNI di Jakarta.

Melalui kunjungan ini diharapkan hubungan dan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang pertahanan semakin erat dan meningkat. "Hubungan kedua negara tidak

diragukan lagi, terjalin sangat erat sejak lama kurun waktu 50 tahun dalam kerangka ASEAN yang luar biasa", tutur Menhan RI saat menerima Pangab Malaysia.

Hubungan baik kedua negara di bidang pertahanan telah berkontribusi bagi terciptanya rasa aman di kawasan. Selain itu juga mendukung peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Menhan RI mengatakan, banyak tantangan di kawasan yang sudah diatasi bersama-sama kedua negara baik melalui kerja sama bilateral maupun kerja sama multilateral dengan negara-negara ASEAN.

Kerja sama yang sudah berjalan sangat baik antara lain kerja sama

patroli bersama Indonesia, Malaysia dan Singapura di Selat Malaka dan kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui kerja sama patroli terkoordinasi laut dan udara dalam pengamanan Laut Sulu.

Menurut Menhan RI tantangan bersama di kawasan yang nyata saat ini yakni ancaman terorisme dan radikalisme. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antar negara di kawasan.

Sementara itu, Panglima Angkatan Tentera Malaysia juga menyampaikan hal senada dengan Menhan bahwa tantangan bersama di kawasan saat ini adalah terorisme. Dan Malaysia telah belajar banyak dari Indonesia terkait bagaimana penanganan ancaman terorisme.***



KEMHAN SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdy TNI Hadiyan Sumintaatmadja Membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Pertahanan Negara (Rakor Jakhanneg) TA. 2018. Selasa (28/8), di Kantor Kemhan, Jakarta.

Sekjen mengatakan, "Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai salah satu pengembang fungsi di bidang pertahanan, merumuskan kebijakan pertahanan negara dalam mensukseskan kebijakan untuk kesejahteraan dan keamanan, serta menghasilkan hal-hal yang positif bagi penyelenggaraan pertahanan negara", ujar Sekjen.

Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat memiliki tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-



Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. "Kebijakan

pertahanan negara disusun berdasarkan visi misi pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara", tegas Sekjen Kemhan.

Rakor yang pokok-pokok pembahasannya adalah tinjauan peran pelaksana tugas pokok



Kemhan di daerah dalam menyiapkan pertahanan sejak dini melalui sinergitas pertahanan negara pusat dan daerah. Rakor diikuti oleh berbagai kalangan dari 34 provinsi. Mulai dari pejabat Teritorial TNI AD, pejabat Potmar TNI AL di daerah, pejabat Potdirga TNI AU di daerah, Kakesbangpol Provinsi dan Bappeda Provinsi.

Sekjen berharap kepada semua pemangku kepentingan di bidang pertahanan negara "Perlunya persamaan persepsi, koordinasi, peran aktif dapat dijabarkan dan diimplementasikan untuk membangun komitmen nasional dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada lingkup Kementerian/Lembaga sampai dengan pemerintah daerah", ujar Sekjen.

Penyelenggaraan pertahanan negara melibatkan semua pihak, tidak hanya TNI sebagai kekuatan utama, melainkan juga melibatkan

seluruh Kementerian/Lembaga terkait dan peran serta masyarakat sebagai wujud dari Sishanta sesuai pasal 30 UUD 1945.

Sekjen menekankan bahwa pertahanan negara merupakan manfaat yang tak ternilai seberapa besar anggaran yang dialokasikan oleh negara, namun demikian merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan negara serta penopang terhadap tegaknya NKRI.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas diantara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung penjabaran visi, misi dan program prioritas (*Nawa Cita*) pertahanan negara, melalui sosialisasi kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015-2019 dan instansi vertikal Kementerian Pertahanan, tata ruang wilayah pertahanan dan pembangunan wilayah perbatasan, serta konsep bela negara.

Pembinaan bela negara dilaksanakan pada lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka dibutuhkan pembinaan bela negara yang diselenggarakan secara simultan, terpadu, dan menyeluruh serta berlanjut, selaras dengan sasaran pembangunan nasional.

Lebih lanjut Sekjen mengatakan, Rakor Jakhanneg Tahun 2018 ini menjadi hal yang penting untuk menyiapkan pertahanan sejak dini melalui bela negara di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia terus berkomitmen mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan dalam pergaulan dunia melalui politik bebas aktif. Tentunya semua itu harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.***



BALITBANG KEMHAN GELAR PAMERAN LITBANGHAN

Dalam rangka mensosialisasikan hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang telah dicapai untuk ditampilkan kepada masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan menggelar Pameran Bursa Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan). Pameran yang berlangsung di Balitbang Kemhan dibuka Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati yang ditandai dengan pemukulan gong, Selasa (28/8).

Pameran Bursa Litbanghan yang mengangkat tema, "Inovasi Menuju Kemandirian Pertahanan Sebagai Wujud Bela Negara" ini sebagai pembuktian bahwa hasil-hasil Litbang selama ini bermanfaat bagi masyarakat. Tema ini relevan karena

bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah bangsa pejuang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi melalui kesadaran bela negara.

Hal ini menjadi fondasi yang kuat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan terutama yang berkaitan dengan alutsista. Untuk itu demi mewujudkan alutsista yang modern dan berteknologi tinggi serta merupakan karya anak bangsa, dibutuhkan penelitian dan pengembangan yang serius, akurat serta tepat sasaran.

Dalam amanat Menhan yang dibacakan Kabalitbang bahwa untuk memproduksi produk-produk guna keperluan pertahanan negara yang inovatif maka interkoneksi

antara industri pertahanan nasional dengan Badan-badan Litbang mutlak diperlukan. Mengingat kemandirian industri pertahanan nasional dibangun atas tiga pilar yaitu interkoneksi industri pertahanan dengan Badan Litbang dan Perguruan Tinggi.

Badan-badan Litbang disini mencakup divisi internal industri pertahanan serta juga institusi-institusi lain yang melakukan aktifitas penelitian dan pengembangan yang dapat didayagunakan untuk keperluan industri pertahanan.

Selain Badan Litbang, peran industri pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat penting dan peran itu telah ditunjukkan dengan baik

oleh industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS dalam bentuk produk-produk inovasi alutsista yang dihasilkannya.

Melalui penyelenggaraan pameran ini diharapkan masyarakat dari berbagai kalangan, institusi pemerintah, swasta dan lembaga riset maupun mahasiswa dan pelajar lebih mengenal produk-produk Litbanghan dalam negeri yang telah dan akan digunakan oleh TNI. Pameran ini diikuti sebanyak 40 institusi terdiri dari 4 (empat) kementerian/lembaga, 5 (lima) TNI, 6 (enam) Perguruan Tinggi dan 25 industri pertahanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kabalitbang Kemhan menyerahkan hasil Litbang Balitbang Kemhan kepada TNI AL berupa Mobile

Hyperbaric Chamber hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Samudra Wiaca Kusuma. Selain itu juga diserahkan Kapal Selam

Tanpa Awak (KSTA) hasil kerja sama Balitbang Kemhan dengan PT Robomarine.***





FORUM BAKOHUMAS: MEWUJUDKAN INDUSTRI PERTAHANAN YANG MAJU DAN MODERN

Perlu disadari bahwa dalam usaha memajukan industri pertahanan, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks baik berupa persaingan ketat antar negara dalam merebut pangsa pasar maupun kemampuan dan daya saing. Menghadapi tantangan tersebut diperlukan strategi yang jitu serta kerja sama yang erat diantara ketiga pilar industri pertahanan yaitu pemerintah, pengguna dan industri pertahanan.

Demikian sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) yang dibacakan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos. saat membuka acara Forum Komunikasi Bakohumas Kemhan dengan tema "Pengembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri Untuk

Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Yang Maju dan Modern",

Tema dari Forum Komunikasi Bakohumas tersebut Sekjen menilai relevan karena memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya industri pertahanan. Lebih jauh, Forum tersebut memberikan pengetahuan tentang pengembangan kemandirian industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu upaya nyata bangsa dalam memajukan industri pertahanan demi penguatan pertahanan negara.

Sekjen Kemhan mengatakan, "Kemhan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertahanan negara dengan pelaksanaan program-program kerjanya. Ada

beberapa pencapaian di bidang penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara. Terkait dengan 4 tahun Pemerintah Kabinet Kerja salah satunya adalah komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing", ujar Sekjen.

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi pentingnya ketiga pilar industri pertahanan dalam membangun semangat dan minat kerja sama dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Pembangunan industri pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional sebagai sebuah bangsa diwujudkan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya yang

pada akhirnya bermuara kepada kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri tentunya perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri.

"Eksistensi industri pertahanan pada akhirnya diarahkan untuk tujuan nasional yang lebih besar yaitu dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional", ungkap Sekjen.

Dengan eksisnya industri pertahanan, maka tidak saja kebutuhan alutsista dalam negeri akan terpenuhi akan tetapi juga akan dapat memenuhi kebutuhan alutsista di kawasan regional maupun internasional, sehingga memberi dampak positif yang mampu memberikan efek berantai bagi pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan perkembangan ekonomi nasional serta peningkatan SDM menuju Indonesia maju.

Sekjen berharap kebijakan-kebijakan ini dapat disebarluaskan pada masyarakat, baik pejabat kehumasan Kementerian/Lembaga ikut membantu Kemhan dalam mensosialisasikan berbagai program penguatan industri pertahanan. Ada banyak terobosan strategis yang dibuat oleh Kemhan maupun industri pertahanan untuk lebih mendayagunakan kemampuan putra-putri terbaik bangsa yang berkecimpung dalam industri pertahanan dalam negeri.

Melalui Forum Komunikasi Bakohumas, Sekjen menjelaskan bahwa perlu disadari, pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab Kemhan dan TNI, namun merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. "Kita semua berharap sinergitas kita semakin meningkat sehingga penyelenggaraan pertahanan negara dapat semakin optimal", jelas Sekjen.***



BADAN PENELITIAN DAN





WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN



73 YEARS OF SERVICE FOR THE NATIONAL ACHIEVEMENTS

STRATEGIC VALUE OF
SUBMARINES IN THE STATE
DEFENSE

PANCASILA AND THE ROLE
OF THE YOUTH

THE DYNAMICS OF STATE
DEFENSE IN FILLING AND
MAINTAINING THE NATIONAL
INDEPENDENCE



9 771693 023126



EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja

Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Center
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editors:

PNS M. Adi Wibowo, M.Si
1st Lt. Lindu Baliyanto.

Graphic Designer:

Imam Rosyadi
Mandiri Triyadi

Photo:

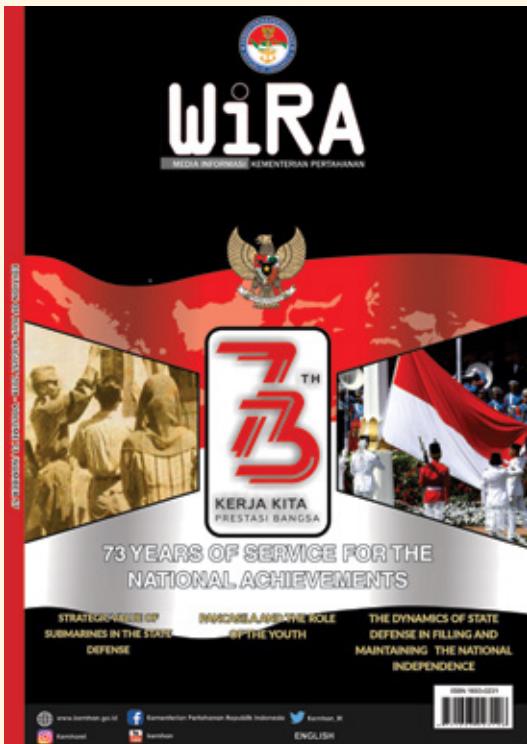
Photografers of Public Communication Center of
MoD

Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

Published by:

Public Communication Center of MoD,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta
Telp. 021-3829151



Editorial



Dear kind readers,

We warmly greet you through this fourth edition of WIRA of July-August 2018. It brings materials related to 73 Years of Service for the National Achievements; Strategic Value of Submarines in the State Defense; Pancasila and the Role of the Youth; The Dynamics of State Defense in Filling and Maintaining the National Independence.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine can also be accessed online in www.kemhan.go.id.

Contents

ARTICLE

6

73 YEARS OF SERVICE FOR THE NATIONAL ACHIEVEMENTS

Independence is a "golden bridge" or a gateway to a fair and prosperous society. Based on the Indonesian dictionary, "Merdeka" is free from all kinds of colonialism. Independence always has a very important meaning for the life of the nation. With independence, it means that the Indonesian people get a freedom.



14

STRATEGIC VALUE OF SUBMARINES IN THE STATE DEFENSE

The Navy's arsenal ranks in 2017 and 2018 respectively received 2 new submarines from the Nagabanda Class type, namely KRI 403 Nagabanda and KRI 404 Ardadedali from South Korea.



18

PANCASILA AND THE ROLE OF THE YOUTH

Massive threat of radicalism occurs increasingly among educated young people, especially students (see various results of research conducted by LIPI, UI, Education and Training Research and Development Agency (Balitbangdiklat) Ministry of Religion, State Intelligence Agency (BIN), National Counter Terrorism Agency (BNPT), and so on).

22

THE DYNAMICS OF STATE DEFENSE IN FILLING AND MAINTAINING THE NATIONAL INDEPENDENCE

The word 'merdeka' comes from Sanskrit, 'maharddhika', which means monk or sacred, very wise/pious. This understanding is also often associated with the sanctity inherent in the monk, a prestigious position of dignity in Buddhism. That means there is a process of individual autonomy who has freed itself from the shackles that have taken away its salvation and honor.

73 YEARS OF SERVICE FOR THE NATIONAL ACHIEVEMENTS

By:

Muhammad. Adi.Wibowo, M.Si

Head of Publishing Unit, Information Cooperation Section,
Public Communication Centre, Indonesian Ministry of Defence



Source : xdetik.com

Independence is a "golden bridge" or a gateway to a fair and prosperous society. Based on the Indonesian dictionary, "Merdeka" is free from all kinds of colonialism. Independence always has a very important meaning for the life of the nation. With independence, it means that the Indonesian people get a freedom. Free from all forms of foreign oppression and control. Free to determine the fate of the nation itself. This means that Indonesia is a sovereign nation, a nation that must have its own

responsibility in the life of the nation and state.

Precisely on 17 August 1945, on behalf of the Indonesian nation, Ir. Soekarno accompanied by Drs. Muhammad Hatta proclaimed the Indonesia's independence. It was such an historic event for the Indonesian people, namely Independence. Since then the Indonesian people have been freed from the shackles of Dutch and Japanese colonials. The proclamation of the Indonesian

independence and its recognition by the world has been obtained by this nation with a heavy struggle. With the independence state, a nation will have self-esteem and can sit together side by side with other nations in the world.

There is no word worthy of saying besides gratitude to God Almighty, because until 2018 the nation and state of Indonesia still stand tall and embrace their 73rd Independence Day. For 73 years the Indonesian people could enjoy

the atmosphere of independence without any colonialism.

It can be imagined as a large country Indonesia has a diversity and diversity of ethnic groups, races, religions, beliefs, ideology, politics, social culture and economics. Diversity in Indonesian society has become God's decree Almighty. Without His Grace and Gifts and all the hard efforts of all components of Indonesian society, it is impossible to maintain and maintain the unity of diversity in Indonesia.

This expression of gratitude was expressed by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo, in a state speech during the Republic of Indonesia's Independence Day, August 16, 2018 at the Nusantara Building, Senayan, Jakarta. According to President Jokowi for 73 years the Indonesian nation has shown itself as a formidable nation, a resilient nation, a nation that wants to

continue to achieve victory and progress. At the age of 73 this year, the Indonesian people continue to work, endeavor, strive to pursue the nation's achievements, because it must be admitted, there are several other countries that have achieved progress faster than the Indonesian state. But despite this problem, this nation remains grateful that it is still better than many other countries.

Even though there is a lot to be grateful for, people should not be satisfied easily. Indonesia must catch up with other countries, which are able to run faster in achieving its progress. Indonesia must become a developed country that can stand on par with other developed countries in the world. Indonesia must be a sovereign, dignified and respected country in other countries in the world.

In making various leaps of progress, it requires a factor of courage and firmness to make decisions, which are best for

the interests of the Indonesian people. The implementation of this assertiveness is also directed at efforts to safeguard the Unitary Republic of Indonesia, affirming the pledge of Unity in Diversity, preventing and eradicating terrorism to its roots. Support for the implementation of synergy from the role of the Police, TNI, BIN, BNPT, and all elements of the Indonesian nation are always upheld in preventing and fighting terrorism.

Therefore, the Government will continue to ensure the security stability, including with more modern defense equipment and improve the capabilities, professionalism and welfare of the TNI and Police. As a large country, we must protect our state sovereignty by building a modern defense system and a professional military. Besides, the welfare aspect of TNI soldiers and members of the National Police is not spared by the government's attention. Gradually, the increasing



welfare is carried out as an effort to support the performance of the TNI and Police.

Along with President Joko Widodo's affirmation, the Ministry of Defense continues to be committed to improving the quality of national defense operations by implementing the Ministry of Defense's work programs. In the fourth year of the Working Cabinet Government, the Ministry of Defense showed several achievements in the implementation of national defense policies.

As for the achievement of the field of implementation of the National Defense Policy, covering five aspects; planting the values of state defense in order to strengthen the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and realize national

development, the achievement of the TNI Posture through the construction of the Minimum Essential Force (MEF) in order to deal with threats, the acceleration of development of border areas and leading small islands (PPKT) in order to equalize development, improve defense cooperation with friendly countries and increase the sending of UN peace mission forces, as well as a commitment to build a strong, independent and competitive defense industry.

Firstly, it is related to the cultivation of the values of state defense. In order to strengthen the integrity of the Unitary Republic of Indonesia and realize national development, the Ministry of Defense has implanted the values of state defense, which is to increase the love of the country, awareness of the nation and state, believe in

Pancasila as the nation's ideology, willing to sacrifice for the nation and the state, and have the initial ability to defend countries in all areas of community life. In connection with this, the Ministry of Defense has a program to establish 100 million cadres within 10 years. The results of the country's defense cadre formation program up to April 2018 have reached 83,424,186 cadres.

Secondly is the achievement of TNI posture through the construction of the Minimum Essential Force (MEF) in order to deal with threats. Carrying out modernization of defense equipment, improving maintenance and maintenance, fulfilling infrastructure and organization, improving professionalism and welfare of soldiers, and developing the defense industry are the actions which have been done.





The completion of phase II MEF from the budget aspect up to TA 2018 has been allocated a budget of 34.35%. The projection of the achievement of the TNI MEF development until the end of the second strategic plan from the defense equipment aspect is 75.54%. The achievement of physical aspects of defense equipment is 59.41%.

The third achievement is related to the acceleration of the development of border areas and the forefront of small islands (PPKT). The target is carried out in the framework of the equitable development of the Accelerated Development of the Frontier and Small Islands (PPKT) as the front page of the Republic of Indonesia continues to be developed in order to realize the development of human resources for Indonesia.

This development is carried out by the Defense and TNI in the form of the construction of the Border Patrol and Patrol Road (JIPP) in Kalimantan, the construction of a National Cross-border Post (PLBN), infrastructure development in order to open up isolated areas of Kalimantan, Papua and NTT, strengthen defense country in PPKT, as well as solving the problem of the national border in Kalimantan.

To expedite the acceleration of development, accelerating steps have been taken through coordination with relevant Ministries/Agencies. JIPP's development target in 2018 is projected to reach 882.12 km or 48.50% of the total target of 2,019 km and which has been hardened along 257.05 km or 12.73%.

Fourth, increasing the defense cooperation with friendly countries and increasing the deployment of UN peace mission forces. Optimizing education, training, discussion and dialogue with friendly countries in the defense sector. Increasing defense diplomacy through dialogues and strategic partnerships with friendly countries and arranging the mechanism of defense attaché functions, which are elements of the TNI. Increasing the number of peacekeepers in UN missions with a target in 2019 to be the 10th world rank contributing UN forces.

The results achieved in the fourth goal include the Indomalphi Trilateral Cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines by realizing Trilateral Maritime Patrol, Trilateral Air Patrol and training cooperation. We also



succeeded in realizing multilateral cooperation " Our Eyes" in order to exchange information on strategies between: Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei Darussalam, Singapore and Thailand.

The fifth last commitment is to build a strong, independent and competitive defense industry. The Ministry of Defense is committed to building a strong, independent and competitive defense industry. The development of the defense industry is an important part in maintaining national interests as a nation, which is manifested in various forms both in the form of regulation up to its implementation, which ultimately leads to the sovereignty and independence of a nation.

To build an independent defense force, it certainly needs to

be supported by an independent defense industry. The existence of the defense industry is ultimately directed to a greater national goal that can support national economic growth.

With the existence of the defense industry, not only will the defence weapon system needs at home be met, but it will also be able to meet the needs in the regional and international regions, so as to have a positive impact that can provide a chain effect on equitable economic equality and national economic development and human resource enhancement towards Indonesia. The real results that have been achieved include the construction of 3 submarine units. Two units have been completed and the third unit reaches 75% development.

All of this is an achievement and proof of the work of the Ministry of Defense in strengthening the implementation of national defense based on our work spirit for the nation's achievements, which is the theme of the 73rd anniversary of the Republic of Indonesia's Independence.

Year 2018 Significance For the Indonesian Nation

The work program achievements of the Ministry of Defense which was inscribed on the State of Indonesia, are very relevant to the theme of the celebration of the 73rd anniversary of the Republic of Indonesia's Independence Day this time, namely "73 Years, Our Work is the National Achievement". Besides, this theme is also very relevant because 2018 is a special year for Indonesia, besides coinciding

with 73 years of Indonesian Independence; we also welcome the XVIII Asian Games event where Indonesia is given confidence again to host after 56 years.

This theme, which contains 2 main related substances, is namely "Energy" and "Work". Energy means the source of enthusiasm (internally) and radiates out (externally) from the focal point. Work means always moving/active. The Energy theme was taken from the XVIII Asian Games theme, "The Energy of Asia". Whilst, the theme of 'Work' is a reflection of the government of the President of Indonesia, Joko Widodo over the past 4 years for a better change. Furthermore, this theme suggests that work and energy are complementary entities. In addition, it is expected to have

an impact on the Indonesian people so that they can create a spirit of working together to build the country and the spirit to be a good host for the world. The spirit of working together to build this country has the essence as well as an invitation to all Indonesian people to put forward the principle of togetherness. Through this slogan, people are reminded to come back together to unite in differences and continue the struggle to become a respectable nation, the Indonesian Nation.

Founding Father said, Bung Karno, that independence is defined as the gateway to freedom. The independence achieved by the Indonesian people must be filled and maintained. Filling and maintaining independence can be done through various ways of development, advancing the general welfare, educating the life of the nation, and participating in carrying out world order based on independence, eternal peace and social justice. ***

The existence of a period of independence does not mean that the nation's struggle is over. However, new challenges emerge to maintain and fill it with various development activities. The same is true of what our



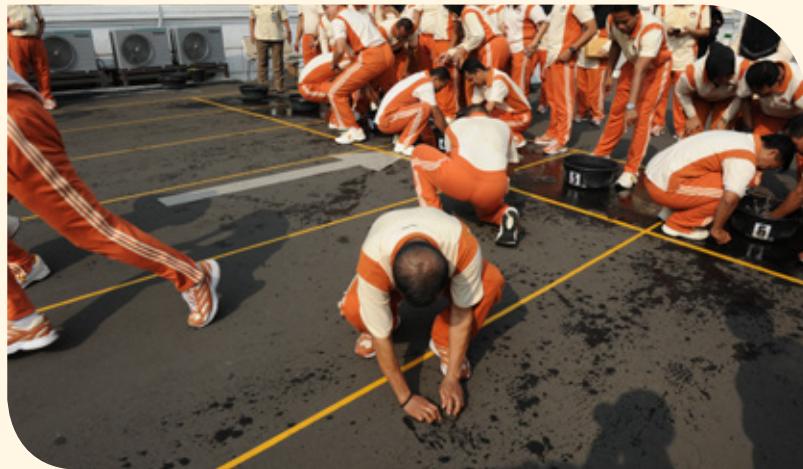
18th ASIAN GAMES Jakarta Palembang 2018

“The Energy of Asia”

Source: toptier.id

In a celeration of the Independent Day, Ministry of Defense held several competitions which were echoed by Echelon 2 to members serving in the Ministry of Defense.





STRATEGIC VALUE OF SUBMARINES IN THE STATE DEFENSE

By:
Joko Ismoyo
Media Radio Journalist

The Navy's arsenal ranks in 2017 and 2018 respectively received 2 new submarines from the Nagabanda Class type, namely KRI 403 Nagabanda and KRI 404 Ardadedali from South Korea. Although the submarine is actually still in one class with 2 the previous submarines units of Cakra Class,

namely Type 209, but both have different characteristics. On KRI 401 Cakra and KRI 402 Nenggala, ordered with the exact same condition as the description of the maker from the Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) shipyard, Germany. While Nagabanda Class was created at Daewoo

Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) based on the design of the Navy's team so that it could no longer be compared to Chang Bogo Class which was originally offered.

Apart from having the same type of 2 variants carrying the 209 type, is the additional amount in the Navy's



submarines instantly able to change the defense projection map in the future? the answer is yes and sure. Countries that have submarines can be considered as countries that are serious to envisage the importance of defense equipment. Why? Unlike surface warships that can be seen continuously with the eyes and monitored by radar, submarines are the opposite. Submarines work mysteriously, carried out the undetected and unknown missions. With these advantages, many countries are trying to find antidotes. Either by having a submarine or having an anti-submarine fleet unit.



Apart from functioning as an attack, defence, the submarine can also be employed to carry out a secret mission. The Nagabanda Class with its ability to operate for 52 days can travel in an economic distance of 740 km. Submarines can enter other countries without appearing. Then it was safely secured, the submarine released its charge depending on what mission it was carrying. No wonder the narcotics syndicate also makes submarines independently to bring narcotics through the river.

In the Southeast Asia region, Indonesia initially started the submarine ownership in the ranks of the army. There were 12 submarines from Whiskey Class imported from the Soviet Union to support the Trikora operation. In the next decades, the countries around Indonesia also did the same thing. In the Southeast Asia region, Malaysia and Singapore also decided to have a submarine, likewise Australia on the south side. The presence of submarines indirectly raises the arms race. Having a submarine is considered insufficient to deal with a submarine because in the history of the war, there has been no reference to the fact that there were incidents of submarine fighting. Thus, the answer is the pressure of possessing anti-submarine weapons systems in addition to the submarines.

Anti-submarine warships with sonar senses are one answer to ward off submarines. However, anti-submarine warships are not sufficient because of the constraints of the sensing system. It takes more than one anti-submarine warship to be able to determine submarine coordinate points. Along with

technological developments, the latest sonar senses are able to be carried by helicopter and airplanes. Those types of weapon systems are also be able to carry torpedoes or sea bombs to destroy submarines.

However, it's still not easy. By having the ability that can carry out target attacks under water and on the surface of the water, submarines already have their own battle arenas that can move separately and independently in carrying out operations. The existence of submarine ownership, also forces other countries to have a special collection of special defence equipment dedicated to submarine battles which is not cheap nor easy to find invisible moving submarines.

The submarine warfare was considered inconvenient not only during the war times but also in the peace times that there were several incidents involving submarines or suspected submarines revealed from the news.

Reflecting on operating experience and incidents involving submarines, Indonesia's defense doctrine must be moving forward, especially in anticipating and facing anti-submarine warfare. The Naval force has warships equipped with sonar and underwater weapons, anti-submarine helicopters and maritime patrol aircraft as its assets. With the current detection and anticipation capabilities, the TNI does not necessarily feel complacent but must continue to enrich itself by learning about the anti-submarine warfare doctrine owned by other countries while strengthening the capabilities of the TNI defense equipment.



Indonesia's desire to be able to produce submarines independently is truly a program that must be appreciated. PT PAL engineers are now able to assemble a third submarine which is a continuation of Transfer of Technology from South Korea. Although all three modules were produced in South Korea, PT PAL's technicians have proven successful in uniting the three modules into a single unit. It is expected that by 2019, submarines made by PT PAL can be submitted to the Navy after undergoing sea trials.

Of course, the advantages or disadvantages of 2 types of submarines owned by the Navy at this time cannot be compared. Class Cakra which was present in 1981, is still active and has a lot of experiences in the operation. This experience cannot be compared to the Nagabanda Class that was officially received in 2017. With all the advantages that Nagabanda Class has, this submarine must be able to prove it in an operation that will later be charged. ***





PANCASILA AND THE ROLE OF THE YOUTH

By:

Lieutenant Colonel Inf Drs Sabar Simatupang, M.Si
Defense University Academics and KSKN UI Masters Graduates



Source: denidesain.pkl

In the commemoration of Indonesian Independence Day August 17, 2018 and also still in the series of celebrations for the Pancasila Birth Day on June 1, 2018 this time, there is a "deep concern" in our minds. This is related to the fact that in the midst of society there are still massive indications of radicalism (terrorism), liberalization, pragmatism, moral decadence and a sense of nationality, especially in some of the younger generations. The question is how do young people now and, in the future, interpret the value of the Indonesian

struggle for independence from an ideological perspective?

In this context the offer of the National Defense Awareness Program (PKBN) initiated by the government through the Ministry of Defense (Kemhan), especially for the younger generation of Indonesia is increasingly finding its relevance. One of the very fundamental basic values in the PKBN is "convinced of Pancasila as the State ideology". For this reason, the actual strategic position recommended for young people now and in the future is to

become a pioneer of nationality in the implementation of the Pancasila state ideology in every field of service.

The irony of the Reform Order

Since the fall of the former President Suharto in 1998 (meaning the end of the New Order government), there appears to be an irony of counterproductive tendencies with the initial idea of Reforming the total new government. The New Order government which was previously

considered failed to maintain the existence of the state ideology and the welfare of the people, finally all its political policies (including PKBN) were rejected by the initiators of the Reform Order.

After 20 years of the Reform Order, the political and legal reforms in the life of the state and society emerged tendencies which showed the occurrence of moral decadence (socio-cultural), ideology, politics and law among the wider community, especially the younger generation. This can be observed by the increasingly massive involvement of the young people in various drug cases, corruption, terrorism, crime and other criminal acts. If we map the tendency of the mindset and attitudes of today's society ideologically, then there are some intensive threats happen gradually.

First, massive threat of radicalism occurs increasingly among educated young people, especially students (see various results of research conducted by LIPI, UI, Education and Training Research and Development Agency (Balitbangdiklat) Ministry of Religion, State Intelligence Agency (BIN), National Counter Terrorism Agency (BNPT), and so on). This phenomenon is clearly very worrying that the wider spread through the social media can affect the attitudes and behaviour of future generations, especially children and adolescents (primary, secondary and upper education levels).

The indications of this influence can be seen from the various facts of the involvement of some religious activists from students / youth / teenagers become a terrorists and volunteers / sympathizers of ISIS

followers who had left for Syria, the emergence of intolerant attitudes and waning ideological awareness of Pancasila in some youth, lack of interest towards the nationalism activities/ patriotism, and so on.

Second, the threat of neoliberalism as an antithesis to the ideology of Pancasila among the people. The rapid progress of science and technology (modernization), in addition to have a positive impact, it is feared to have negative implications for the younger generation. Indications of rampant moral decadence (cases of corruption, drug abuse, pornography) as a result (side effect) of the advancement of information technology among political leaders nowadays, it is psychologically can be fatal and distort the nature of thinking as well as the attitude of the younger generations.



Source: beritadaerah.co.id



Third, in spite of the fact that it was considered "debatable" in the Suharto regime's rejection circles, it was realized that the unconscious tendency of the return of ideology (reideologysation) communism could occur in the pragmatism, cynicism and frustration of the youth, in the situation of inequality and injustice in the society. As an alternative to the negative effects of Neo-liberalism, the emergence of the influence of the ideology may occur in certain groups of people.

Fourth, the strengthening of primordialism (SARA) values politicized by political elites and society will be dangerous to affect the mind and behavior of the younger generation. If this tendency cannot be controlled (given the very heterogeneous condition of society), it will be accumulatively vulnerable to the disintegration of the nation and the destruction of the country in the future.

Fifth, although the threat of fascism / totalitarianism and

authoritarianism at this time has not caused real conditions in the life of the state and society, but the challenges can occur in the behavior (ideological practice) among political leaders / mass organizations of this country. The dialectic of the ideological understanding regarding this matter, of course, academically needs to be re-examined, so that the younger generation is not trapped in the pragmatism and authoritarianism of power. Basically, Fascism craves a strong country with a single concentration of power and authoritarianism that misuses military power.

Efforts of Revitalization

The concept of National Defense Awareness (PKBN) adopted by Indonesia basically refers to the constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). In this constitution it is stated that the spirit and efforts of the State Defense are vital (rights and obligations) for all Indonesian citizens (Article 27 paragraph 3 of

the 1945 Constitution). This PKBN conception contains substantially 5 (five) basic values, namely Love of Homeland, Conscious of Nation and State, Confident of Pancasila as State Ideology, Willing to Sacrifice for Nation and State, and Have Basic State Defence Ability.

In order to re-socialize PKBN, it is necessary to take concrete steps to revitalize and implement the concept of State Defence's values. In order not to appear dogmatic or doctrinal, the concept of State Defence should be reformulated. This is in line with the development of national and international strategic environmental changes now and in the future. One of the efforts to revitalize the State defence Concept is how an understanding of Pancasila as a state ideology is relevant to changes in the real dynamics threat nowadays. Some of the ideological dynamics threat that arise have been described clearly above.

To revitalize the concept of state

defense, especially the value of the Pancasila belief as a state ideology among the younger generation, these following strategic steps can be taken. First, the President and all other high government institutions need to formulate a legal umbrella to become a legal standing (in the form of special legislation) immediately to revive the importance of living and practicing Pancasila ideology in state life, nation and society. This effort is certainly aimed at the younger generation of Indonesia's successors, namely groups of youth, teenagers and children.

Second, all ministries need to reformulate the right methods and programs (ie actual, adaptive and relevant to the times) in the formation of Pancasila ideological awareness that is in accordance with the scope of authority, duties

and responsibilities respectively. The formulation of ideological guidance specifically for the younger generation should be spearheaded by the Ministry of Youth and Sports together with BPIP and supported by other ministries. This is also can be done together with Education and Training Agency (Badiklat) as well as Research and Development Agency (Balitbang) in each ministry, of course functionally under the coordination of each ministry, so that it can be harmonized with the elaboration of government work policies and programs.

ideological threats and challenges that are truly vulnerable to the pluralistic conditions of Indonesian society and adaptive to the ever-changing and fast-paced strategic environment changes. Therefore, at the end, every young man is expected to be able to implement the understanding of Pancasila Ideology in their respective service life. Long-life the Birth of Pancasila and Republic of Indonesia Independence 2018 ***

Third, all stakeholders in national education in Indonesia have the time to re-homogenize the translation of the materials of Pancasila Ideology in the learning curriculum at every level of education nationally. This description must be adapted to the

**NILAI-NILAI DASAR
DALAM BELA NEGARA**

	CINTA	TANAH AIR
	SADAR	BERBANGSA DAN BERNEGARA
	YAKIN	PADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
	RELA	BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA
	MEMILIKI	KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA



Sumber: blyceum.id

THE DYNAMICS OF STATE DEFENSE IN FILLING AND MAINTAINING THE NATIONAL INDEPENDENCE

Oleh:

Major Dr. Achmed Sukendro, S.H.,M.Si

Peace and Conflict Resolution Study Program Lecturer

National Security Faculty, Indonesian University of Defence

The word 'merdeka' comes from Sanskrit, 'maharddhika', which means monk or sacred, very wise/pious. This understanding is also often associated with the sanctity inherent in the monk, a prestigious position of dignity in Buddhism. That means there is a process of individual autonomy who has freed itself from the shackles that have taken away its salvation and honor. In other words, independence can be interpreted as a new reality of each individual or people regardless of all forms of confinement.

Independence is the gateway, said Bung Karno. The independence achieved by the Indonesian people

must be filled and maintained. Filling and maintaining independence with the development of all of Indonesia's bloodshed and to advance the general welfare, educate the life of the nation, and participate in carrying out world order based on independence, eternal peace and social justice aimed at meeting the aspirations of the Indonesian people embodied in the opening of the Basic Law 1945. State defense is one form of maintaining and filling independence. State defense is one of the obligations of citizens as stated in the 1945 Constitution paragraph 30.

All citizens, starting from the

establishment of the Republic of Indonesia Unitary State (NKRI) formally, carry out state defense. State defense is not only done when the state faces sovereignty or conflict or war but in a period of peace and fills the independence of the state defense is still carried out. State defense is carried out in various conditions of the Indonesian nation, defending the country from experiencing the dynamics along with the dynamics that develop in Indonesian society. As large as a large nation both in terms of its contents and the composition and number of population or citizens, the Indonesian people experience the socio-economic political

dynamics of defense, culture, ideology, security and foreign relations. This paper will describe the dynamics of state defense in fulfilling independence in terms of political dynamics, since Indonesia's independence, to date.

The Dynamics of the Indonesian Nation

Humans as social beings always need other human beings to fulfill their needs. It is impossible that human can live individually in its environment. They always have a sense to live in groups due to the ever-changing or dynamic environment. These changes force people to use their mind, creativity, feelings and endurance to deal with it.

Social scientists agree that human life is not static but will always change (dynamic). This

condition is called social change. According to More (Narwoko, 2007: 362) social change is defined as an important change in social structure, behavioral patterns and social interaction systems, including changes in values, norms and cultural phenomena. A change will always be present in the journey of human life that becomes the dynamic of his life. The difference is that these changes occur quickly or slowly, even if a person or group of people living in remote areas will experience the dynamics of life. The dynamics or changes of society can occur due to several factors (Salam, 2010: 258), including:

1. Information distribution, which includes the influence and mechanism of the media in conveying messages or ideas (thoughts).
2. Capital, among other things are

human resources or financial capital

3. Technology. It is an element as well as a factor, which is rapidly changing in accordance with the development of science.
4. Ideology or religion. Certain religious or ideological beliefs affect the process of social change.
5. Bureaucracy. It is especially related to certain government policies in building its power.
6. Agents or actors. This is generally included in human capital, but specifically what is meant is individual initiatives in "finding" a better life.

Dynamics are manifested in the process of internalization and externalization. There cannot be



Sumber: vik.kompas.com

a society that does not have the tendency to always reposition to determine its future. A society is an entity that moves continually.

As a nation, Indonesian people experience social, cultural, political, economic, defense and security dynamics in filling and maintaining independence since the Proclamation of Independence to date. In the political field, the dynamics of national and state life in filling and maintaining independence are very pronounced. The dynamics of the Indonesian nation in the political field are also influenced by technological, ideological, bureaucratic and information dissemination factors. Overall, the Indonesian nation experienced 3 (three) political dynamics namely the Old Order era, the New Order era and the Reform era.

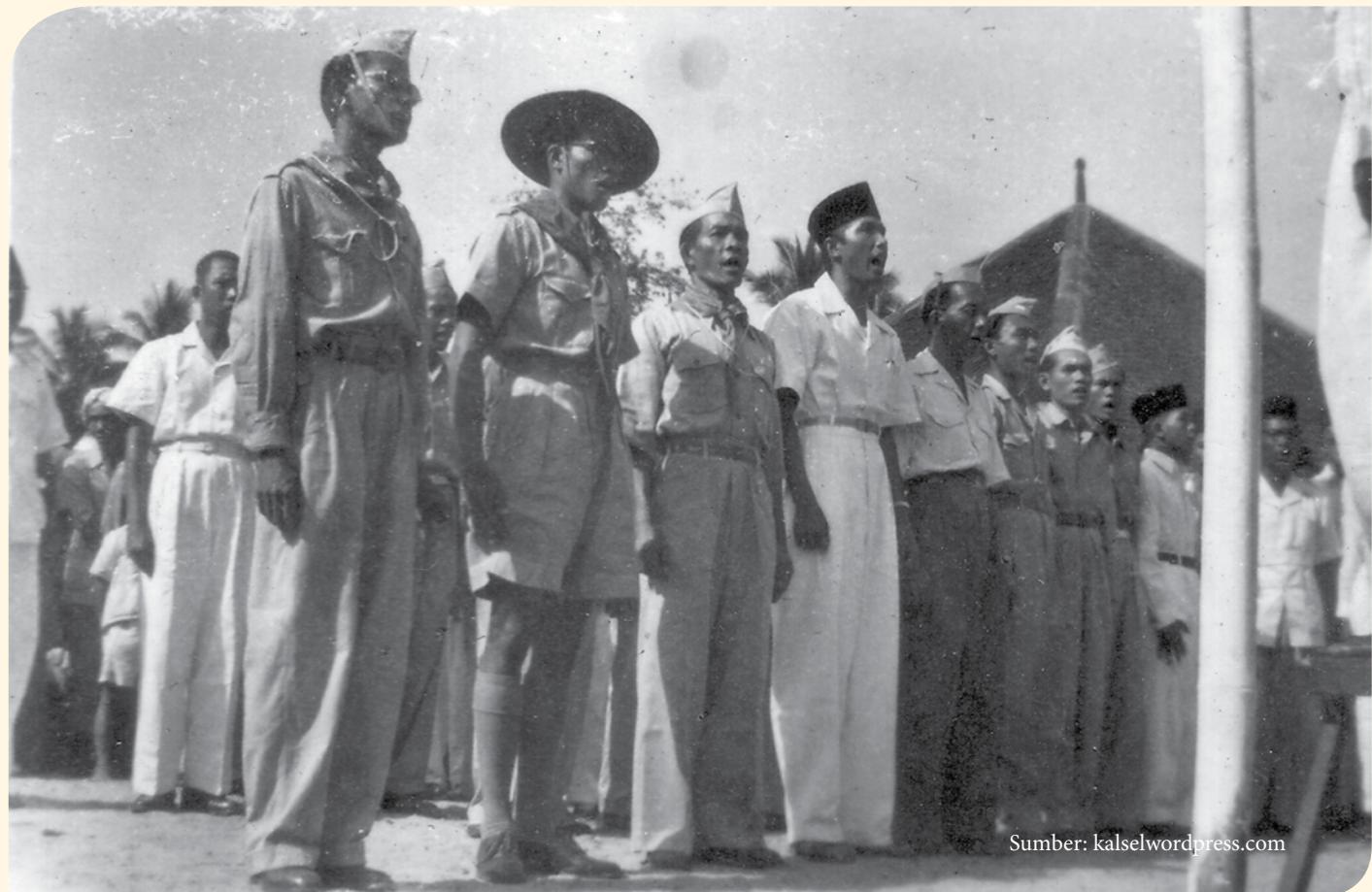
State Defence in Old Order Era (1945-1969)

After the proclamation of independence, Indonesia under the leadership of Ir Soekarno, experienced a political situation of nation and state which was dominated by efforts to maintain independence. The community faces external military threats. Those threats, such as the returning of the colonial state (Dutch) and rebellions in regions, which want to separate from the Unitary Republic of Indonesia.

In the late 1948, the Dutch carried out the 2nd military aggression. The Dutch occupied Yogyakarta, which at the time was the capital of the country. The Soekarno-Hatta leaders were taken as prisoners and the army left Yogyakarta guerrilla led by Commander in Chief Soedirman.

Soekarno-Hatta sent a telegram saying: "We, President of Republic Indonesia, reported that on Sunday 19 December 1948 at 6:00 a.m. the Dutch attacked the Capital of Yogyakarta City. If the government cannot carry out its authority in the circumstances, we authorize Mr. Sjafruddin Prawiranegara, the Minister of National Prosperity to form an Emergency Government in Sumatra.

The telegram did not reach Bukittinggi, but at the same time Mr. Syafruddin Prawiranegara had taken the initiative. During a meeting near Ngarai Sianok, Bukittinggi on December 19, 1948, the PDRI was proposed. The governor of Sumatra, Mr. TM Hasan approved the proposal to save the Republic of Indonesia. PDRI has been mentioned as the savior of the nation.



Sumber: kalselwordpress.com

The TNI as the main component of defending the country was not formed by the state, when the Indonesian state was officially formed on 17 August 1945. The Indonesian National Army (TNI) was originally just an organization called the People's Security Agency (BKR). On October 5, 1945 it changed its name to the People's Security Army (TKR), which was later changed again to become the Army of the Republic of Indonesia (TRI). In the days of the defense of independence, many militias of struggle or popular struggle bodies were made by the people to protect themselves. While continuing to fight and fight for the sake of upholding the sovereignty and independence of the nation, the government also sought to improve the capacity of the TNI.

On June 3, 1947 President Soekarno authorized the existence of the Indonesian National Military

(TNI), in order to unite two armed forces, namely between the TRI and the armies of the people's struggle officially to further strengthen the defense system. The Round Table Conference (KMB) was held in December 1949 in the city of The Hague, giving a chance to Indonesia to become a federated state namely the United Republic of Indonesia (RIS).

In line with this, the RIS Army (APRIS) was formed which was a merger of TNI and KNIL. After the RIS was dissolved on August 17, 1950 and Indonesia became a unitary country as before, then APRIS changed its name to the Armed Forces of the Republic of Indonesia (APRI). In 1962, an attempt was made to merge between APRI and the state police into an integrated organization called the Indonesian Armed Forces (ABRI).

The people as a reserve component in defending the country form a scout youth organization. In the period 1950-1960 scouting organizations grew in number and variety, even including scouting organizations affiliated with political parties. Of course it violates the basic principles and method of scouting. The existence of scouting like this is considered ineffective and cannot compensate for the development of the times and is less useful in supporting the development of the Nation and the development of the younger generation that preserves the unity and unity of the Nation.

Paying attention to such circumstances and at the urging of scout leaders at the time, and starting from the provisions of the MPRS No. II/MPRS/1960, President Soekarno as the MPRS mandate on March 9, 1961 gave a mandate to the leader of



Sumber: suratkabar.id

Pandu at the Merdeka Palace. He feels obliged to carry out the mandate of the MPRS, to further streamline scouting organizations as a potential component of the nation in the development of the nation and state. Therefore he declared the dissolution of scouting organizations in Indonesia and merged them into a single scouting education movement organization called PRAMUKA MOVEMENT which was given the task of carrying out scout education to Indonesian children and youth.

Scout Movement with a symbol of COCONUT SEEDS in the form of the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 238 of 1961, dated May 20, 1961. Although Presidential Decree No. 238 of 1961 established the Scout Movement, it was officially introduced to the public on 14 August 1961, shortly after the

President of the Republic of Indonesia conferred the Banner of the Scout Movement with the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 448 of 1961. Since then, the 14th of August was used as the Birthday of the Scout Movement.

In an effort to mobilize the people to help the main component/ ABRI in maintaining the state sovereignty, President Soekarno issued a Government Regulation in Lieu of Law/PERPPU Number 1 of 1962 concerning the Calling and Submission of All Citizens in the Framework of General Mobilization for State Security and Defense Interests (State Gazette Number 8 of 1962) and Law Number 14 of 1962 concerning the Establishment of Perppu Number 1 of 1962 into Law (State Gazette Number 2492 of 1962).

In the face of various domestic uprisings, the Village Security Organization (OKD) and the Village Security Force (PKD) were formed which were later integrated into the People's Resistance Organization (WANRA) as the forerunner of the Civil Defense. On May 20, 1960, Indonesia was officially registered as a member of the International Civil Defense Organization (ICDO), which later inspired the formation of a Civil Defense organization formally on April 19, 1962, which we later made as the Anniversary of the Civil Defense (HANSIP Anniversary).

Students as a component of the people also participate in efforts to defend the country. General AH Nasution, on June 13 - September 14, 1959 ordered mandatory training for students in West Java. Students who get this training are ready to defend



Sumber: mursydriva.wordpress.com



Sumber: menwawiradharma.blogspot.com

the home-front and if necessary may bear arms to the battlefield. Walawa students (MANDATORY TRAINED STUDENTS) were educated at Kodam VI Siliwangi and the Walawa were given the right to wear the Siliwangi symbol. On December 19, 1961 in Yogyakarta, the President of the Republic of Indonesia, Revolutionary Chief of Staff, Bung Karno, initiated Trikora. All people welcomed this command by stuttering with enthusiasm for the revolution to seize West Irian; including students.

Since Trikora echoed, national vigilance has been strengthened, so that it has culminated in the emergence of an education plan for reserve officers in universities. Based on the two decrees of the VI Siliwangi Commander, the University on January 20, 1962 established a coordinating body named the All-Purpose Regiment Formation

Preparation Board for Student Dam VI Siliwangi (abbreviated as BPP) Student Regiment DAM VI Siliwangi. In February 1962 a ten-week Refreshing Course was held in the Infantry Main Regiment and continued within 14 days of training known as Pasopati Exercise. On May 20, 1962 1959 Student of Regiment members appointed by the Commander VI/SLW be part of Kodam VI/SLW personnel.

In the four-year work plan, the formation of core cadres has been formed and this has been since the beginning of the second semester of the academic year 1962-1963 including the formation of a female core cadre. West Java students (Bandung in particular) take part in the training at the Bihbul, where the soldiers are assembled (now Secaba Dam III/Slw, Bihbul). The core units of student's battalions from several universities and academies are

sent to this place under the care of the instructors of RINSIL. June 12, 1964 came the Decree of the Minister of Defense and Security Component Coordinator General AH Nasution who authorized the Two Mahawarman Regiments. The Coordinating Minister himself carried out the delivery of Duaja. Garuda Mahawarman officially stands side by side with the Siliwangi Tiger.

State Defense of the New Order Era (1967-1998)

The economic crisis and ideological crisis (cold war era) also hit Indonesia. There was a G 30 S/ PKI rebellion based on communist ideology. The government of Soekarno was changed to President Soeharto's government. The threat of state defense and security is no longer in the form of rebellions or the return of the colonial state but

the economic crisis and ideological crisis. The government under the leadership of President Soeharto focused on filling independence with economic and ideological development. State defense during the Sukarno era was continued and improved. ABRI as the main component besides as a defense force also carries out socio-political functions.

In 1972, based on Presidential Decree No. 55 of 1972, the Civil Defense organization was perfected into a Civil Defense organization (HANSIP) and the People's Resistance and People's Security organization (WANKAMRA) in order to control the implementation of the total people's defence system.

In accordance with the Decree, the main functions of the Civil Defense include the fields of (1) Protection of the Community (2) National Resilience (3) Government and people's welfare (4) Production. Based on Presidential Decree No.56 of 1972, the guidance of the non-combatant Civil Defense organization was handed over to the Ministry of Home Affairs, while the management of people resistance and security organizations remained within the Department of Defense.

As a follow-up of the above two Presidential Decrees, the Minister of Defense/Commander of the Armed Forces and the Minister of Home Affairs with Joint Decree Number Kep/37/IX/1975 and Number 240 A of 1975 have outlined that the main tasks of Hansip, Kamra and Wanra are:

1. Hansip helps and strengthens the implementation of National

Defense and Security in the field of Community Protection;

2. Kamra assisted the National Police in his duties in the field of Civil Service Maintenance and Order operations;
3. Wanra assisted the TNI in military operations, in the framework of operations;

On January 19, 1978 another ministerial decree was issued regarding the operational guidelines

for the organization of the Student Regiment. To restore students' lives from political activities and concentrate more on scientific fields, Minister of Education and Culture, Dr Daoed Yoesoef issued Decree No. 0156/U/1978 concerning Normalization of Campus Life (NKK), followed by Decree No. 0230/U/J/1980 concerning general guidelines for organization and membership of the Student Coordination Board (BKK).



Sumber: desamulyorejo.wordpress.com

The New Order government considered that the occurrence of the national tragedy, G-30-S/PKI in 1965, was because the Indonesian people did not implement Pancasila and the 1945 Constitution in a pure and consistent manner. After the Indonesian nation was able to overcome the consequences of the turmoil caused by the movement of the G-30-S/PKI, and has been able to establish a building program, it is felt necessary to improve the character of the nation by developing the attitudes and behavior of citizens in accordance with the mandate contained in the Basic Law. So the People's Consultative Assembly, in its General Session, on March 22, 1978 established the Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila. Thus the implementation of P-4 is the will of the people, set by the Indonesian MPR as the incarnation of the people, which must be obeyed.

Reform Era (1999 - Present)

The dynamics of world politics, the end of the cold war era, globalization, the era of democracy that penetrated national borders and the economic crisis hit the world in the 1998 era. Indonesia also experienced the effects of globalization, economic crisis and advances in information technology and the era of democratization. The Soeharto government, which was considered too long, needed to be replaced and the system of government was then reformed.

In national life, the impact of reform is not all positive. The euphoria of excessive freedom results in a decline in the field of law, nationalism and national

identity as an Indonesian nation. Almost all aspects in the New Order government tend to be eliminated and abandoned. The State defense activities also tend to disappear.

President BJ Habibie issued Presidential Instruction No. 2 of 1999 concerning the separation of the National Police from the Armed Forces. The People's Consultative Assembly/People's Consultative Assembly strengthened the separation of the National Police from ABRI by issuing the TAP MPR No. VI/2000. On April 1, 1999 at ABRI Headquarters, Cilangkap, officially the Armed Forces Commander General Wiranto presided over the release of POLICE from ABRI. Since then the main component of national defense is the Indonesian National Military/TNI.

State defense activities for students are intensified by the issuing of a Decree from three Ministers namely Minister of Defense, Minister of National Education, and Minister of Home Affairs and Regional Autonomy No: KB/14M/X/2000, No: 6/U/KB/2000, and No: 39 A 2000 dated October 11, 2000 concerning the Development and Empowerment of Student Regiments. The government led by President Dr. Bambang Soesilo Yoedhoyono made a revitalization program for the Scout movement. The revitalization of the scout movement is based on the fact that there is a decline in the scout movement, namely: the existence and role of the scout movement, which is increasingly diminishing and delays in adjusting to the changes that occur. The Scout Revitalization Movement was initiated by the

issuance of RI Presidential Decree Number 104 of 2004 concerning Ratification of the Scout Movement Articles of Association, followed by the declaration of revitalization of the scout movement by President Soesilo Bambang Yoedhoyono on August 14, 2006.

The invitation of the President of the Republic of Indonesia in the Revitalization of the Scout Movement is to: strengthen the Scout Movement as a forum for the formation of the nation's character, achieve success through smart and sincere hard work, encourage young people to improve the spirit of defending the country, strengthen the determination of young people as development patriots. Above all, solidify the unity and unity of the Republic of Indonesia and observe Satya and Dharma Pramuka. On December 18, 2006, President Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Decree No.28 of 2006 stipulating December 19, the date of the formation of the PDRI, as a State Defense Day.

The dynamics of the world and the people of Indonesia experienced a very drastic change from time to time. With the advancement of information technology in the form of social media for the present time, it will be more varied and challenging to realize the physical form of State Defense. The impact of social media is not only positively able to support life easily and quickly but also has a negative impact on the life of the nation and state. The seeds of intolerance, radicalism, the process of eroding national insight also colored the life of the Indonesian nation. Even so, despite all the challenges presented by the phenomenon, it

is realized or unconscious that the community must still be able to respond to the developments that occur and always have to be able to take the positive side, and leave the negative side.

Besides that, the forms of state defense must continue to be carried out by the nation's children, by way of loving Indonesian culture beyond foreign culture, introducing Indonesian culture on the international scene by utilizing technological and communication sophistication such as social networking.

For the youth generation, the form of state defense that can be done is by expressing aspirations

accompanied by responsibility for expression, maintaining the good name of the family, institutions and the state of Indonesia. Various other ways that can be implemented are to train intellectual ability with a truly teaching and learning process so that it can benefit the nation and the state, participate in tackling natural disasters and social care, safeguarding the integrity and security of the state by complying with the laws and regulations, as well as maintaining threats from other countries.

The effort to apply the form of state defense is the duty of every citizen that can be carried out by individuals and groups of Indonesian people in order to realize the nation

and state of Indonesia that are safe and strong from attacks and threats. The Ministry of Defense as the leading defense sector of the country continues to actively socialize awareness programs to defend the state and educate state defense cadres from various walks of life and professions. Once again, the Indonesian people should understand together that the State Defense is not an act of militarism or compulsory military service but as a whole part of the cultivation of the values of defending the country to all the Indonesian people. ***



